

# **RENJA**

## **RENCANA KERJA**

### **2023**

**DINAS KESEHATAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen Renja Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinkes DIY) merupakan turunan dari Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinkes DIY. Adapun Renstra tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2023.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 2023. RKPD merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Daerah DIY dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan tahun 2023 dalam merencanakan, menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan. RPJMD DIY menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD) DIY sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan RKPD yang selanjutnya diturunkan dalam Renja OPD. Renja Dinkes DIY digunakan sebagai sinkronisasi kebijakan dan penyesuaian target pembangunan tahunan nasional dan daerah, pembangunan tahunan Daerah DIY dan kabupaten kota serta pembangunan tahunan antar daerah.

Diharapkan Renja ini dapat dimanfaatkan sebagai dokumen yang memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di lingkup Dinas Kesehatan DIY untuk tahun anggaran 2022.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB 1           PENDAHULUAN</b> .....	<b>1-1</b>
1.1       Latar Belakang .....	1-1
1.2       Landasan Hukum .....	1-5
1.3       Maksud dan Tujuan.....	1-6
1.4       Sistematika Penulisan .....	1-6
<b>BAB 2           HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021</b> .....	<b>2-1</b>
2.1       Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	2-1
2.2       Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	2-10
2.3       Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	2-25
2.4       Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	2-29
<b>BAB 3           TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>3-2</b>
3.1       Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	3-2
3.2       Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	3-5
3.3       Program dan Kegiatan.....	3-6
<b>BAB 4           RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>4-2</b>
<b>BAB 5           PENUTUP</b> .....	<b>5-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-2
Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .....	2-11
Tabel 2-3 Capaian Kinerja 2021.....	2-17
Tabel 2-4 Rumusan Indikator dan Formulasi perhitungan Pelayanan kesehatan yang Bermutu .....	2-21
Tabel 2-5 Target dan Realisasi Kinerja 2021.....	2-21
Tabel 2-6 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terdampangi Akreditasi.....	2-23
Tabel 2-7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Pelayanan Kesehatan Jiwa Bermutu .....	2-25
Tabel 2-8 Target dan Realisasi Kinerja .....	2-25
Tabel 2-9 Pencapaian SPM RS Jiwa Grhasia.....	2-25
Tabel 2-10 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Paru yang Bermutu .....	2-32
Tabel 2-11 Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan Kesehatan Paru yang bermutu .....	2-32
Tabel 2-12 Standar Mutu RS Paru Respira tahun 2021 .....	2-33
Tabel 2-13 target dan Capaian Kinerja 2021.....	2-37
Tabel 2-14 Review Terhadap Rancangan Awal RKPd tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-38
Tabel 2-15 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .....	2-62
Tabel 3-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan.....	3-4
Tabel 3-2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	3-6
Tabel 4-1 Program dan Kegiatan 2023 .....	4-1

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pencapaian Indikator AHH.....	1-3
Gambar 2.1 Indikator Keluarga Sehat.....	2-19
Gambar 2.2 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan.....	2-35

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan merupakan sebuah investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan tujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan Pembangunan kesehatan dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan DIY yang tercermin melalui capaian komponen pembangunan kesehatan dalam indikator Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan hasil yang baik..

Derajat kesehatan sebagai indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM) DIY tergantung kepada perkembangan angka kematian dan kesakitan. Dalam konteks kesehatan, kematian yang menjadi perhatian utama adalah kematian yang disebabkan oleh berbagai permasalahan kesehatan yang dalam hal ini dapat dibagi menjadi kematian umum dan kematian spesifik (kematian ibu, bayi dan balita). Kematian spesifik yang menjadi perhatian prioritas memiliki pengaruh besar terhadap umur harapan hidup dikaitkan dengan besaran yang dihasilkannya.

Angka Harapan Hidup (AHH) DIY merupakan yang terbaik secara nasional dengan capaian 74.74 tahun di tahun 2017, 74.82 tahun di tahun 2018, 74.92 di tahun 2019, 74.99 di tahun 2020 dan di tahun 2021 mencapai 75.04, hal tersebut menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik

Arah pembangunan kesehatan DIY telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Sedangkan secara teknis, arah pembangunan kesehatan 2023 didasarkan pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023.

Permasalahan- permasalahan pokok urusan kesehatan dalam perencanaan tahun 2023 diantaranya yakni :

- a. Kurangnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat yang ditunjukkan dengan angka prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) yang berada di atas rata-rata nasional. Menurut data Riskedas 2018 capaian prevalensi beberapa Penyakit Tidak Menular diantaranya prevalensi Diabetes Melitus di DIY 4,5% sementara angka Nasional 2,4%, untuk Hipertensi di DIY 10,7% dan angka nasional 8,4%, terkait kasus kanker, di DIY 10,7 per mil dan Nasional 8,4 per mil. Diperlukan peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai upaya meningkatkan kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sesuai Permenkes No 4 Tahun 2019, khususnya mengenai kewenangan SPM bidang kesehatan di tingkat provinsi terkait dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana dan pelayanan kesehatan dalam kondisi kejadian luar biasa (KLB).

- c. Belum optimalnya fasilitas layanan kesehatan dalamantisipasi dan penanganan KLB dan bencana.
- d. Peningkatan kasus Covid-19 yang cukup tinggi di tahun 2021, sehingga perlu adanya penanggulangan dan pencegahan. Dinkes DIY telah melakukan berbagai upaya secara promotif, preventif, dan kuratif baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut misalnya penyelenggaraan vaksinasi, recruitment tenaga kesehatan dan relawan tenaga kesehatan maupun mahasiswa pendamping kesehatan, promosi kesehatan, dan pelaksanaan testing dan tracing covid-19. Pada tahun 2023 diperlukan kesinambungan upaya sehingga pandemi dapat ditangani dan selanjutnya terkendali dengan baik.
- e. Angka Stunting masih cukup tinggi. Hasil Riskesdas 2013 untuk Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita di DIY menunjukkan angka 27,30% dan angka nasional pada 37,2%, sedangkan 2018 di DIY sebesar 21,41% dan angka nasional pada 30,8 % pada 2018 dan 37,2% pada 2013. Penurunan angka di DIY lebih kecil dibanding angka nasional (penurunan sampai 6,4%).
- f. Tingginya kasus HIV/AIDS. Kondisi ini terlihat pada penambahan jumlah kasus HIV sebesar 209 dan penderita AIDS sebesar 69 orang pada tahun 2019. Data Dinas Kesehatan DIY menunjukkan akumulasi pengidap HIV AIDS dari tahun 1993 sampai dengan 2019 sebanyak 4.990 orang, dimana 1.716 orang diantaranya telah positif AIDS. Faktor penyebab utama adalah penularan melalui hubungan heteroseksual.  
Untuk HIV-AIDS sampai dengan tahun 2020 jumlah akumulasi kasus HIV sebanyak 5.627 kasus dengan penemuan kasus baru sebanyak 363 kasus. Penemuan kasus baru HIV lebih banyak ditemukan pada laki-laki (69,6%) dengan kasus tertinggi pada rentang usia 25-49 tahun. Sedangkan kasus baru AIDS sebanyak 94 kasus dengan kasus terbanyak pada rentang usia 40-49 tahun. Pada tahun 2021 kasus HIV di DIY sebanyak 5.878 kasus dengan penemuan kasus pada laki-laki sebanyak 4.029 kasus dan pada perempuan sebanyak 1.849 kasus.
- g. Prevalensi gangguan jiwa Skizofrenia di DIY masih tinggi. Data Riskesdas 2018 menunjukkan angka 10,36 per mil rumah tangga masih lebih tinggi dengan angka nasional sebesar 7,0 per mil.
- h. Jumlah kasus kematian ibu masih belum bisa ditekan. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 36 kasus kematian ibu dengan penyebab tertinggi adalah pendarahan, pada tahun 2020 jumlah kematian bu sebesar 40 kasus, dan meningkat cukup tajam di tahun 2021 menjadi 131 kasus. Salah satu faktornya adalah kondisi 3T (terlambat merujuk, terlambat sampai, dan terlambat mendapat pertolongan) dan kualitas kesehatan ibu hamil, serta dikarenakan adanya kematian karena Covid-19.
- i. Target cakupan imunisasi di DIY adalah 95% dan telah terpenuhi untuk wilayah DIY dimana hasil laporan menunjukkan bahwa cakupan semua imunisasi tahun 2021 sudah memenuhi target karena sudah berada di atas angka 95%.
- j. Pada tahun 2021 dari hasil PISPK didapatkan beberapa data diantaranya keluarga mengikuti program KB sebesar 43.85%, Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan 96.78%, Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap 97.67%, Bayi mendapatkan ASI Eksklusif 90.35%, Pertumbuhan Balita dipantau 94.15%, Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar 32.46%, Penderita hipertensi yang

berobat teratur 23.83%, Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan 27.55%, Anggota keluarga tidak ada yang merokok 56.95%, Keluarga sudah menjadi anggota JKN 74.9%, Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih 94.03%, dan Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga 96.83%.

Parameter sasaran kesehatan harus terus diusahakan untuk diperbaiki seperti angka kematian ibu dan balita, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta penyiapan penanganan bencana.

Selain itu perlu diperhatikan permasalahan-permasalahan dalam kesehatan di DIY yakni kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak masih perlu ditingkatkan, Edukasi makanan sehat untuk keluarga dan siswa, belum terpadu antar stakeholder, perlunya pendampingan keluarga sehat, dan kondisi rumah sakit dan puskesmas yang belum ramah terhadap lansia, anak-anak serta difabel/ penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya.



Gambar 1.1 Pencapaian Indikator AHH

Deskripsi situasi pencapaian indikator kesehatan yang dijabarkan dalam Gambar Pencapaian Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) di DIY selalu meningkat setiap tahunnya. Tahun 2017, tercatat angka harapan hidup di DIY adalah 74,74 tahun, melampaui angka harapan hidup pada tahun 2016 sebesar 74,71 tahun. Data Badan Pusat Statistik Tahun 2018 AHH di DIY adalah 74,82 sedangkan di tahun 2019 mencapai 74,92, di tahun 2020 mencapai 74,99 dan data terakhir di tahun 2021 mencapai 75,04. Kematian dipengaruhi oleh keberadaan penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular termasuk kecelakaan serta perilaku berbahaya seperti konsumsi narkoba. Selain itu ditahun 2020-2021 kematian juga dipengaruhi oleh adanya Pandemi Covid-19.

Pelayanan kesehatan sebagai ujung tombak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan, tersusun oleh beberapa program yang pada prinsipnya merupakan penggambaran dari upaya pelayanan komprehensif (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif). Upaya tersebut khususnya diberikan penekanan kepada upaya penanganan permasalahan pokok tanpa mengabaikan upaya-upaya lainnya. Permasalahan

pokok dimaksud adalah kesehatan ibu, bayi, anak, penyakit tidak menular dan menular, gizi, kejadian luar biasa, kondisi kedaruratan dan bencana, perilaku sehat dan lingkungan sehat.

Upaya memberikan pelayanan yang optimal perlu didukung oleh penyediaan sumberdaya memadai yang terdiri sarana prasarana, sediaan farmasi, dan pembiayaan kesehatan yang memadai khususnya bagi kelompok masyarakat miskin. Keseluruhan upaya pelayanan dan penyediaan pelayanan perlu dikelola dan didukung kebijakan, manajemen dan administrasi yang memadai pula. Guna menyelaraskan hal-hal tersebut di atas, maka perlu disusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD), khususnya untuk tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan DIY merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan DIY khususnya dan pembangunan kesehatan daerah pada umumnya untuk periode 1 tahun. Dokumen Renja Dinas Kesehatan DIY memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, program, kegiatan, dan kelompok indikator kinerja beserta rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Adapun indikator rencana kinerja meliputi sasaran, program dan kegiatan. Dalam proses penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPd.

## 1.2 Landasan Hukum

Sebagai dasar hukum yang mendasari penyusunan renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 1.2.2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 1.2.3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 1.2.4. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 1.2.5. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 1.2.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 1.2.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 1.2.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 1.2.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
- 1.2.10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 1.2.11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- 1.2.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 1.2.13. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 1.2.14. Kepmendagri No 050-5889 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah
- 1.2.1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi DIY
- 1.2.2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2009

- 1.2.3. tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi DIY 2005-2025  
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan DIY adalah sebagai dokumen perencanaan Dinas Kesehatan DIY untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan dokumen resmi yang memuat program dan kegiatan Dinas Kesehatan DIY tahun 2023. Renja Dinas Kesehatan DIY tahun 2023 ini adalah sebagai terjemahan dari Renstra Dinas Kesehatan DIY 2023-2026, yang selanjutnya disusun tahunan, khususnya untuk periode tahun 2023. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan 2023 juga menyelaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan renja Dinas Kesehatan DIY tahun 2023 ini adalah agar perencanaan pembangunan kesehatan di DIY tahun 2023, lebih terarah untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan DIY tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II. EVALUASI PELAKSANANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal OPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### BAB IV. PENUTUP

## **BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2021**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja OPD Dinas Kesehatan DIY Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Kerja Tahun 2021.

Keberhasilan Dinas Kesehatan DIY Tahun 2021 dapat diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan DIY 2017 – 2022. Renstra Dinas Kesehatan DIY merupakan dokumen yang berisikan hasil pemikiran dan komitmen bersama Dinas Kesehatan DIY dengan berbasiskan data, asumsi-asumsi, analisis serta pendekatan metodologi yang tepat. Dari keseluruhan proses tersebut menghasilkan dokumen rencana strategis yang memuat visi dan misi Gubernur DIY, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran. Selanjutnya renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja OPD atau Renja OPD seperti saat ini melalui penyusunan Renja 2023. Namun demikian, Renstra telah mengalami perubahan dengan mengakomodasi pada perubahan organisasi mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Secara rinci gambaran pencapaian indikator keberhasilan Dinkes DIY dapat dilihat pada tabel berikut 2.1 berikut:

Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Lembar : .....

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat at Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Wajib									
	Bidang Urusan Kesehatan									
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indikator 1: Persentase Balita Sehat	41.22%	40,62%	30.28%	39.8	133.69	41.22%	n/a	n/a
		Indikator 2: Persentase Desa Sehat Mandiri	58.21%	76,7%	54.66%	79.27	104.03	58.21%	n/a	n/a
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKm dan UK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penurunan Persentase Balita Kurus	0.4%	0.3%	0.2%	4.51	2.255%	0.4%	n/a	n/a
		Penurunan Persentase Ibu Hami; Kurang Energi Kronik (KEK)	1%	0.28%	0.5%	12.16	2.432%	1%	n/a	n/a
		Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenata minimal 4x (K4)	77%	77.52	75%	97.67	130.22 %	77%	n/a	n/a
		Peningkatan Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)	89%	87.46%	88%	91.3%	103.75%	89%	n/a	n/a

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> ) / kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat at Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Desa yang telah mengimplementasikan 5 pilar STBM	22.8	47,94	22.8	53.4%	234.21%	22.8	n/a	n/a
		Persentase Jumlah TTU yang memenuhi syarat	96	93,4	94%	92.5%	98.4%	96	n/a	n/a
		Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri	51.14	54.66	50.46%	68.7	136.14%	51.14	n/a	n/a
		Persentase terbentuknya Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas	100	85,95	80.17	88.43	110.3%	100	n/a	n/a
		persentase puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	62.84	59.12%	61.26%	61.78	100.85	62.84	n/a	n/a
		Indikator: Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular								

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> ) / kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat at Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKm dan UK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase jumlah anak baduta yang terlindungi dari PD3I	95	93.2%	92.05%	103.6	12.54%	95	n/a	n/a
		Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	100	100	100%	100%	100%	100	n/a	n/a
		Jumlah Kasus kematian DBD di Fasyankes dilakukan audit klinis	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	100%	<1 per 100.000	n/a	n/a
		Persentase kab/kota yang cakupan penemuan pneumoni lebih dari 60%	100	100	80%	80%	100%	100	n/a	n/a
		Persentase Cakupan penemuan TB	40	100	38%	44.54%	117.2%	40	n/a	n/a
		persentase penderita HIV yang menerima pengobatan ARV	72	128.53	70%	98.38	140.54 %	72	n/a	n/a
		Annual Parasite Incidence	< 1 Permil	< 1 permil	< 1 permil	< 1 permil	10%	< 1 Permil	n/a	n/a
		persentase PJPD ditemukan	17.5%	12.5	15%			17.5%	n/a	n/a

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat at Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		persentase kasus jiwa diketemukan	17.5%	12.5	15%	50%	333.33	17.5%	n/a	n/a
		persentase DM diketemukan	17.5%	12.5	15%	59%	393.33	17.5%	n/a	n/a
		Persentase Kanker diketemukan	100	4	5%	3%	60	100	n/a	n/a
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indikator: Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya sesuai Standar Pelayanan	54.85	44,47	45.2%	46.05	100.5	54.85	n/a	n/a
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKm dan UK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	FKTP (puskesmas, klinik pratama), FKTL (RS) dan fasyankes lain (labkesda) yang memenuhi standar pelayanan	245/243	197/262	234/232	234/232	100	245/243	n/a	n/a
		FKTP dan FKTL serta pelayanan kesehatan lain yang menerapkan standar mutu.	237	172	204	204	100	237	n/a	n/a
		persentase calon jemaah haji yang terlayani istito'ah	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Indikator 1: Jumlah FKTP, FKTL dan Fasyankes lainnya memenuhi standar	80.19	62.32	71.98	74.64	103.7	80.19	n/a	n/a

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		
					Target Renja perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		dibagi jumlah Fasyankes dikali 100									
		Kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM tingkat daerah provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) memenuhi standar perijinan SDM tenaga dan sarana	85.71	84.36	84.69	84.69	100	85.71	n/a	n/a
		1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Indikator 2: Persentase Kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai Standar	86.48	73.57	76.19	76.19	100	86.48	n/a	n/a
		1.Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian, sediaan farmasi dan Perbekes serta pengendalian makanan 2.kegiatan Penerbitan izin usaha kecil tradisional(UKOT)	1 . Jumlah sarana pelayanan kesehatan dan produksi distribusi kefarmasian	287	256	275	255	92.72%	287	n/a	n/a
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2 . Persentase Makanan Memenuhi Syarat	75	60	70	60	85.71%	75	n/a	n/a

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat at Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		3 . Ketersediaan Obat	137	135	137	135	98.54	137	n/a	n/a
		Indikator: Jumlah Layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program rujukan dan kebutuhan Masyarakat	15	13	14	14	100	15	n/a	n/a
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKm dan UK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indikator : Jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat	1	2	2	2	100	1	n/a	n/a
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Indikator : Persentase Mantan Linatih yang Meningkatkan Kompetensinya	68	87,8	66	84.5	121.32	68	n/a	n/a

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM tingkat daerah provinsi	Jumlah pelatihan yang dievaluasi	6	4	5	5	100	6	n/a	n/a
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indikator 1: Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKm dan UK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indikator 2: Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan	26	25	26	26	100	26	n/a	n/a
		Indikator : persentase jenis layanan jamkesos yang diakses Masyarakat	100	92.31	96.15	96.15	100	100	n/a	n/a
		Cakupan Jamkes Penyangga	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a
		Cakupan Jamkes Preventif	12	8	10	10	100	12	n/a	n/a
		Cakupan Jamkes Rehabilitatif	25	15	20	20	100	25	n/a	n/a

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> ) / kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat at Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indikator 1: Persentase Pasien yang Mampu ADL (Activity Daily Living)	90%	88	89	96.3	108.2	90%	n/a	n/a
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKm dan UK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indikator 2: Angka Pasien Cidera karena Fiksasi	1%	3	2	0	200	1%	n/a	n/a
		Indikator 3: Waktu Tunggu Pelayanan Obat jadi $\leq$ 30 menit	90%	86	88	88	100	90%	n/a	n/a
		Rata rata jam pelatihan karyawan per tahun	80	75	78	25	32.05	80	n/a	n/a
		Waktu tunggu Pelayanan Rawat Jalan jiwa $\leq$ 60 menit	75	69	72	97.28	135.11	75	n/a	n/a
		Tingkat Penggunaan Tempat Tidur/ Bed Occupancy Rate (BOR)	65%	62	64	34.5	53.91	65%	n/a	n/a
		Penyelesaian Berkas pengajuan klaim pasien jaminan kesehatan	80%	78	79	79	100	80%	n/a	n/a
		Penyusunan laporan tahunan rumah sakit	85%	83	84	84	100	85%	n/a	n/a

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> ) / kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat at Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pemenuhan Sumber Daya Manusia sesuai Analisis Beban Kerja	90%	88	89	87	97.75	90%	n/a	n/a
		Kesesuaian Inventarisasi Barang Rumah Sakit	100%	90	95	95	100	100%	n/a	n/a
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKm dan UK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indikator: Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dan kesehatan lainnya serta pelayanan pendidikan melalui sub kegiatan sbb: 1. Pelayanan Keperawatan 2. Pelayanan Penunjang 3. Pelayanan Medis 4. Pelayanan Sekretariat 5. Pelayanan Pendidikan	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indikator 1: Angka Keberhasilan Pengobatan (success rate) TB	86%	84	85%	86.2	101.41	86%	n/a	n/a

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat at Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Indikator 2: Angka kematian pasien $\geq$ 48 Jam	1%	1.5	1%	2.49	-49	1%	n/a	n/a
		Indikator 3: Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari	80 orang	80	80 org	84.84	106.05	80 orang	n/a	n/a
		Indikator 4: Bed occupancy Rate (BOR)	60%	60	60%	22.43	37.38	60%	n/a	n/a
		Indikator 5: Length of Stay (LOS)	5%	5	5 hari	3.93	121.4	5%	n/a	n/a
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKm dan UK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terselenggaranya pelayanan kesehatan paru dan pernapasan sesuai dengan tata laksana (100%) untuk mendukung keberhasilan pengobatan pasien (81,1%)	100%	100	100	100	100	100%	n/a	n/a
	SPM	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> ) / kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat at Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, tugas Dinas Kesehatan DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan DIY sesuai Bab III Pasal 5, adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- c. penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
- e. penyelenggaraan kesehatan masyarakat;
- f. pengelolaan sumber daya kesehatan;
- g. pengembangan upaya kesehatan tradisional;
- h. pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kesehatan Kabupaten/Kota;
- i. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan kesehatan;
- j. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan DIY memiliki 5 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 87 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan. UPT tersebut adalah Rumah Sakit Jiwa Grhasia, Rumah Sakit Paru Respira, Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, Balai Pelatihan Kesehatan, dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial.

Analisis kinerja pelayanan Dinkes DIY dapat dilihat di tabel 2.2. berikut:

Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
	Indikator 1: Persentase Balita Sehat			38.94%	39.48%	40.06%	40.64%	41.22%	38.94%	40.75%	40,62%	39.8%	41.22%
	Indikator 2: Persentase Desa Sehat Mandiri			25.91%	52.83%	54.66%	56.43%	58.21%	25.91%	68.6%	76,7%	79.27%	58.21%
	Penurunan Persentase Balita Kurus			0.05%	0.1%	0.2%	0.3%	0.4%	0.05%	0.1%	0.3%	4.51%	0.4%
	Penurunan Persentase Ibu Hami; Kurang Energi Kronik (KEK)			0.125	0.25%	0.5%	0.75%	1%	0.125	0.25	0.28%	12.6	1%
	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenata minimal 4x (K4)			73%	74%	75%	76%	77%	73%	74%	77.52	97.67	77%
	Peningkatan Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)			85%	86%	87%	88%	89%	85%	86%	87.46%	91.3	89%
	Jumlah Desa yang telah mengimplementasikan 5 pilar STBM			9.1%	13.7%	18.3%	22.8%	22.8%	9.1%	13.7%	47,94	53.4%	22.8%
	Persentase Jumlah TTU yang memenuhi syarat			88%	90%	92%	94%	96%	92.2%	90%	93,4	92.5%	96%
	Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri			48.17%	48.86%	49.77%	50.46%	51.14%	50%	48.86%	54.66	68.7	51.14%
	Persentase terbentuknya Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas			9.92	29.75	60.33	80.17	100	9.92%	29.75%	85,95	88.43	100
	persentase puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD			9.92	100	100	100	100	9.92	100	100	100	100

**RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2023**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
	Indikator: Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular			53.58%	56.33%	58.92%	61.26%	62.84%	53.58%	70.43%	59.12	61.78%	62.84%
	Persentase jumlah anak baduta yang terlindungi dari PD3I			89.3%	90.65%	92.05%	92.05%	93.4%	89.3%	90.65%	93.2	103.6	93.4%
	Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Kasus kematian DBD di Fasyankes dilakukan audit Klinis			<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000
	Persentase kab/kota yang cakupan penemuan pneumoni lebih dari 60%			20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	80%	80%	100%
	Persentase Cakupan penemuan TB			32%	34%	36%	38%	40%	36%	34%	36%	44.54%	40%
	persentase penderita HIV yang menerima pengobatan ARV			64%	66%	68%	70%	72%	64%	66%	87.4	98.38	72%
	Annual Parasite Incidence			< 1 permil	< 1 Permil	< 1 permil	< 1 permil	< 1 Permil	< 1 permil	< 1 Permil	< 1 permil	< 1 permil	< 1 permil
	persentase PJPD ditemukan			7.5%	10%	12.5%	15%	17.5%	7.5%	10%	12.5%	15%	17.5%
	persentase kasus jiwa diketemukan			7.5%	10%	12.5%	15%	17.5%	7.5%	10%	12.5%	50%	17.5%
	persentase DM diketemukan			7.5%	10%	12.5%	15%	17.5%	7.5%	10%	12.5%	59%	17.5%
	Persentase Kanker diketemukan			2%	3%	4%	5%	5%	3%	3%	4%	3%	5%
	Indikator: Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya sesuai Standar Pelayanan			38.37%	41.08%	48.08%	52.37%	54.85%	38.37%	44.02%	44.47%	46.05	54.85%

**RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2023**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	FKTP (puskesmas, klinik pratama), FKTL (RS) dan fasyankes lain (labkesda) yang memenuhi standar pelayanan			75/170	141/182	192/213	234/232	245/243	75/170	182/262	197/262	234/232	245/243
	FKTP dan FKTL serta pelayanan kesehatan lain yang menerapkan standar mutu.			120	172	204	236	237	120	120	8	236	237
	persentase calon jemaah haji yang terlayani istito'ah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Indikator 1: Jumlah FKTP, FKTL dan Fasyankes lainnya memenuhi standar dibagi jumlah Fasyankes dikali 100			40.58	50.24	62.32	71.98	80.19	40.58	51.2	62.32	74.64	80.19
	Indikator 2: Persentase Kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai standar			66.92	72.05	76.79	81.07	86.48	66.92	73.14	73.57	76.19	86.48
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) memenuhi standar perijinan SDM tenaga dan sarana			70.92	82.65	83.67	84.69	85.71	70.92	82.65	84.36		85.71
	1 . Jumlah sarana pelayanan kesehatan dan produksi distribusi kefarmasian			215	236	256	275	287	215	236	256	255	287
	2 . Persentase Makanan Memenuhi Syarat			55	60	65	70	75	55	60	60	60	75
	3 . Ketersediaan Obat			130	133	135	137	137	130	133	135	135	137
	Indikator: Jumlah Layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program rujukan dan kebutuhan masyarakat			9	11	13	14	15	9	11	13	14	15
	Indikator : Jumlah layanan pengembangan laboratorium			1	2	2	2	2	1	1	2	2	2

**RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2023**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
	untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan Masyarakat												
	Indikator : Persentase Mantan Linatih yang Meningkatkan Kompetensinya			60	62	64	66	68	60	78.46	87.8	84.5	68
	Jumlah pelatihan yang dievaluasi			2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	Indikator 1: Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Indikator 2: Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan			20	22	24	25	26	20	22	25	26	26
	Indikator : persentase jenis layanan jamkesmas yang diakses masyarakat			76.92	84.62	92.31	96.15	100	76.92	84.62	92.31	96.15	100
	Cakupan Jamkes Penyangga			96	98	100	100	100	96	98	100	100	100
	Cakupan Jamkes Preventif			4	6	8	10	12	4	6	8	10	12
	Cakupan Jamkes Rehabilitatif			5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
	Indikator 1: Persentase Pasien yang Mampu ADL (Activity Daily Living)			86	87	88	89	90	91.46	97.38	88	96.3	90
	Indikator 2: Angka Pasien Cidera karena Fiksasi			7	4	3	2	1	0	0	3	0	1
	Indikator 3: Waktu Tunggu Pelayanan Obat jadi $\leq$ 30 menit			82	84	86	88	90	81.97	83.55	86	88	90
	Rata rata jam pelatihan karyawan per tahun			70	72	75	78	89	102	79.88	75	25	89





Hasil evaluasi 2021 terhadap sasaran strategis, didapatkan bahwa semua sasaran strategis Dinas Kesehatan DIY tercapai, bahkan dua diantaranya pencapaiannya melampaui 100%. Secara detail, capaian indikator Dinas Kesehatan DIY 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2-3. Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya perilaku sadar sehat	1 Persentase Puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga	%	100	100	100
2	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu	2 Persentase Pelayanan kesehatan yang terakreditasi	%	70,99	75.19	105,92
3	Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu	3 Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa	%	70	81.39	116.27
4	Terwujudnya pelayanan kesehatan Paru yang bermutu	4 Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan*	%	78.9	78.9	100

Catatan: \* Kesehatan Paru

### 1. Terwujudnya Perilaku Sadar Sehat

Kinerja sasaran Perilaku Sadar Sehat diukur dengan 1 indikator yaitu indikator Persentase Puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga. Sumber data diolah dari hasil evaluasi puskesmas yang mengimplementasikan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) dibagi jumlah seluruh Puskesmas di DIY.

Sasaran terwujudnya Perilaku Sadar Sehat didukung oleh dua program yakni program kesehatan masyarakat serta program pencegahan dan pengendalian penyakit. Hasil pendataan Puskesmas dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga akan dipakai sebagai intervensi sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk itu berbagai upaya penurunan angka penyakit terus dilakukan.

Pencapaian sasaran Terwujudnya perilaku sadar sehat diukur dengan indikator Persentase Puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Indikator ini juga mengakomodasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Program ini bertujuan meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga terdiri atas 4 (empat) area prioritas yang meliputi:

- a. penurunan angka kematian ibu dan bayi;

- b. penurunan prevalensi balita pendek (*stunting*);
- c. penanggulangan penyakit menular; dan
- d. penanggulangan penyakit tidak menular.

Selain itu, pemilihan indikator ini juga mengacu pada kebijakan Gubernur DIY tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari Tahun 2021-2025 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 103 Tahun 2021. Yogyakarta Sehat Lestari adalah kondisi kesehatan yang dicita-citakan warga Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana perilaku sehat, peri kehidupan sehat, penerapan norma dan nilai hidup sehat, akan menjadi budaya yang melekat di dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Puskesmas adalah elemen utama. Tujuan PISPK adalah memperkuat fungsi Puskesmas dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di tingkat pertama di wilayah kerjanya. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di tingkat Puskesmas dilakukan melalui kegiatan:

- a. melakukan pendataan kesehatan seluruh anggota keluarga;
- b. membuat dan mengelola pangkalan data Puskesmas;
- c. menganalisis, merumuskan intervensi masalah kesehatan, dan menyusun rencana Puskesmas;
- d. melaksanakan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
- e. melaksanakan pelayanan kesehatan (dalam dan luar gedung) melalui pendekatan siklus hidup; dan
- f. melaksanakan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas.

Tujuan akhir target puskesmas yang melaksanakan PIS PK adalah tercapainya Indikator Keluarga Sehat (IKS). Parameter keluarga dianggap sehat jika terpenuhi:

1. keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
3. bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4. bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
5. balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6. penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
7. penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
8. penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
9. anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10. keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
11. keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
12. keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Hasil pendataan PISPK diinput langsung dalam aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan melalui <https://keluargasehat.kemkes.go.id/>. Namun hasil pendataan belum semua dapat dikembalikan kepada daerah untuk dapat dimanfaatkan. Masih ada data yang diproteksi oleh Kementerian Kesehatan sehingga hasilnya belum diketahui. Berikut adalah hasil yang sudah dapat diakses oleh puskesmas di wilayah DIY:

NO	INDIKATOR	% CAKUPAN DIY
1	Keluarga mengikuti program KB	39.62
2	Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	96.59
3	Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap	97.52
4	Bayi mendapatkan ASI Eksklusif	90.26
5	Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar	30.72
6	Penderita hipertensi yang berobat teratur	20.5
7	Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan	31.56
8	Keluarga sudah menjadi anggota JKN	74.42
9	Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih	93.89
10	Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga	96.79

Sumber <https://keluargasehat.kemkes.go.id/>

Gambar 2.1. Indikator Keluarga Sehat

Beberapa catatan terkait data diatas adalah sebagai berikut:

- Untuk TB, masih ada yang melewatkan prosedur pemeriksaan yang seharusnya sehingga ada yang tidak terkonfirmasi pemeriksaan bakteriologi sebelumnya.
- Hipertensi umumnya masih dianggap sebagai hal yang lumrah dan bukan penyakit yang mengancam. Sehingga banyak penderita yang enggan melakukan pengobatan secara teratur.
- Hal yang sama juga terjadi pada penderita gangguan jiwa. Pengobatan baru dilakukan ketika dirasakan mengancam keselamatan anggota keluarga lain atau mengganggu lingkungan sekitar.
- Terkait indikator tentang merokok, angka merokok masih tinggi. Namun kesadaran untuk tidak merokok didalam rumah mulai nampak.
- Indikator yang terkait JKN, KB dan Kesehatan Lingkungan  
*Universal Health Coverage (UHC)* merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau. Cakupan universal mengandung dua elemen inti yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan. Pada grafik ini terlihat bahwa sebagian masyarakat sudah menjadi anggota JKN. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang enggan mendaftar secara mandiri. Disisi lain untuk PBI masih ada persoalan pada pendataan. Ada masyarakat miskin namun tidak terdaftar sebagai PBI dan sebaliknya ada masyarakat yang secara ekonomi mampu mendaftar secara mandiri namun malah masuk sebagai PBI. Pada proses transisi ini, DIY masih menyediakan pembiayaan melalui Bapel Jamkessos untuk masyarakat miskin yang tidak dibiayai oleh BPJS dan juga kasus kasus khusus sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2017. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di DIY dengan penerapan fungsi pendampingan melalui program Jamkes Penyangga dan pengembangan komplemen JKN dengan Jamkes Preventif dan Rehabilitatif.

- Di DIY sebagian besar keluarga telah memiliki akses penggunaan sarana air bersih. Di beberapa tempat masih ada masyarakat yang belum memiliki akses terkait faktor geografi (Di wilayah Kulon Progo dan Gunung Kidul) dan juga kondisi ekonomi yang tidak mampu membeli air bersih. Untuk Jamban sehat, di beberapa lokasi masyarakat masih memakai jamban yang dikategorikan sebagai jamban sehat semi permanen dan juga jamban *sharing*. Ini juga berhubungan dengan faktor ekonomi dan faktor geografis yang sulit mengakses air bersih.

Faktor yang mendorong tercapainya indikator tersebut adalah:

1. Dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung percepatan pelaksanaan PISPK oleh puskesmas. Dukungan dana ini memacu persiapan untuk pelaksanaan PISPK menjadi jauh lebih cepat.
2. Pendampingan secara intensif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan DIY maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PISPK serta mengkomunikasikan persoalan teknis ke pusat.

Tantangan yang masih harus diselesaikan adalah sebagai berikut :

1. Kekurangan tenaga enumerator dalam pelaksanaan pendataan PISPK dengan cakupan penduduk di DIY. Tenaga di Puskesmas tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang harus didata.
2. Responden kurang kooperatif dengan menyembunyikan fakta fakta masalah kesehatan yang dialami dan sebagian sulit ditemui. Ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya adalah rasa malu, melihat itu sebagai hal pribadi dan rahasia dan juga karena kesibukan
3. Data yang sudah dientry melalui aplikasi kepusat (Kementerian Kesehatan) tidak bisa sepenuhnya kembali ke puskesmas karena proteksi data oleh Kementerian Kesehatan.
4. Intervensi terkait temuan temuan yang didapatkan dilapangan

Strategi untuk pencapaian Target Berikutnya:

1. Peningkatan Kompetensi tenaga surveyor terutama kemampuan menggali data, memverifikasi dan melakukan observasi.
2. Monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala dan komprehensif
3. Bersama –sama lintas program untuk meningkatkan intervensi lanjutan , dan segera melakukan entry kembali pada perubahan sesuai indikator KS, sehingga dapat merubah Indeks Kesehatan Keluarga (IKS ) wilayah

## 2. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu

Tolok ukur capaian sasaran **Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu** diukur dengan 1 indikator yaitu indikator Persentase Pelayanan Kesehatan yang Bermutu. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), tingkat lanjut (FKTL) dan pelayanan kesehatan lain yang sudah terakreditasi dibagi seluruh FKTP/FKTL dan Fasilitas Kesehatan Lain dikali 100

Kinerja sasaran Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dengan indikator Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Baseline 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%) Target
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	75,19	70,99	75,19	105,92	67,18	

Berdasar Peraturan Menteri Kesehatan No 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, bahwa pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu.

Salah satu cara untuk menilai mutu dan kualitas pelayanan puskesmas dilakukan dengan akreditasi. Dengan implementasi standar akreditasi akan menjamin manajemen puskesmas, penyelenggaraan program kesehatan, dan pelayanan klinis telah dilakukan secara berkesinambungan. Indikator ini dipilih karena akreditasi menjadi bagian dari sebuah penjaminan mutu pelayanan di sektor kesehatan. Dalam upaya ini, Dinas Kesehatan telah melaksanakan pendampingan ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung proses akreditasi. Juga dukungan melalui workshop, pertemuan koordinasi, sosialisasi instrumen untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang pentingnya proses akreditasi untuk dilakukan.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat disebutkan bahwa Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan. Peraturan tentang akreditasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer (FKTP) ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Bahwa Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Puskesmas wajib untuk diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali, demikian juga akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS. Tujuan utama akreditasi Puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Pendekatan yang dipakai dalam akreditasi Puskesmas adalah keselamatan dan hak pasien dan keluarga, dengan tetap memperhatikan hak petugas. Prinsip ini ditegakkan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan.

Dalam upaya ini, Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan telah melaksanakan pendampingan ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung proses akreditasi. Juga dukungan melalui workshop, pertemuan koordinasi, sosialisasi instrumen untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang pentingnya proses akreditasi untuk dilakukan.

**Tabel 2.6 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terdampingi Akreditasi**

Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Jumlah FKTP/FKTL	Jumlah FKTP/FKTL Yang Terdampingi Akreditasi
Puskesmas	121	121
RS	78	68

Sumber : Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain

Beberapa faktor yang mendorong tercapainya indikator tersebut adalah:

1. Regulasi PMK Nomor 99 tahun 2015 tentang Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Pasal 41 ayat (1) dan (2) pada tahun 2020, seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus terakreditasi.
2. Regulasi Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi. Regulasi tersebut diikuti dengan pembuatan petunjuk teknis akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi, pelatihan pendampingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pelatihan akreditasi puskesmas, bimbingan teknis dan pendampingan oleh Dinas Kesehatan DIY dan kabupaten/kota.
3. Peran serta surveyor lokal dengan memberikan asistensi bagi puskesmas yang membutuhkan pendampingan
4. Sosialisasi, bimbingan teknis akreditasi oleh Dinas Kesehatan DIY Provinsi dan Kabupaten/Kota, penguatan komitmen seluruh tenaga Puskesmas , pemenuhan anggaran pendampingan dan akreditasi Puskesmas yang berasal dari DAK non fisik serta validasi data sarana prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas sebelum di *entry* ke dalam aplikasi ASPAK.
5. Ketersediaan SDM Kefarmasian dan kepatuhan dalam mengimplementasikan standar dan pedoman. sarana telah memenuhi standar sarpras, perijinan, SDMk melalui upaya koordinasi dengan BKD provinsi dan kabupaten/kota untuk pemenuhan SDMk sesuai perencanaan kebutuhan, bimtek terpadu RS, bimtek dengan penekanan pada faskes yang dibawah standar, koordinasi dengan kabupaten/kota dengan gerai terpadu perijinan
6. Dukungan regulasi Permenkes nomor 33 tahun 2015 tentang Analisis Beban Kerja, Permenkes nomor 75 tentang Puskesmas, Permenkes tentang 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perijinan RS, dan permenkes nomor 9 tahun 2014 tentang klinik.
7. Balai Laboratorium Kesehatan terus mengembangkan pelayanan yang terkait dengan pemeriksaan laboratorium.
8. Bapelkes mengembangkan Pelatihan yang dievaluasi sehingga semua mantan linatih harus menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang didapat saat pelatihan di instansinya masing masing

9. Jumlah masyarakat miskin terbiayai jaminan kesehatan sesuai dengan kriteria sebesar 100%.

Tantangan yang masih harus diselesaikan adalah sebagai berikut :

1. Masalah Ketenagaan masih menjadi masalah mendasar terutama bagi RS dalam melaksanakan akreditasi.
2. Mekanisme monitoring paska akreditasi belum berjalan optimal.
3. Tenaga Kesehatan yang mampu memenuhi syarat sebagaimana diminta dalam akreditasi masih terbatas. Ini berhubungan dengan Kemampuan penyelenggaraan pelatihan kesehatan yang juga memiliki kapasitas terbatas
4. Ijin pengelolaan limbah medis juga menjadi kendala bagi Rumah Sakit dalam melaksanakan akreditasi
5. Data kepesertaan Jaminan Kesehatan dan kebijakannya

Strategi untuk pencapaian Target Berikutnya:

1. Pembinaan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) untuk mempertahankan penerapan standar mutu pelayanan, serta pembinaan lanjut bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang belum memenuhi standar mutu;
2. Mendorong RS untuk mampu melaksanakan rekrutmen tenaga yang dibutuhkan.
3. Meningkatkan kapasitas pelatihan di Balai Pelatihan Kesehatan
4. Membuat komitmen dan kerjasama dengan instansi terkait perijinan limbah
5. Melakukan Advokasi dengan BPJS

Pencapaian sasaran Terwujudnya perilaku sadar sehat diukur dengan indikator Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tatanan Rumah Tangga, ditetapkan sebagai salah satu dari dua Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan DIY disamping indikator pelayanan kesehatan yang bermutu. Indikator PHBS merupakan indikator komposit yang terdiri dari 10 indikator mencakup gambaran kesehatan individu dan rumah tangga, yaitu

- 1) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan
- 2) Memberi bayi Air Susu Ibu (ASI) eksklusif
- 3) Menimbang Balita setiap bulan
- 4) Menggunakan air bersih
- 5) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
- 6) Menggunakan jamban sehat
- 7) Memberantas jentik dirumah seminggu sekali
- 8) Makan sayur dan buah setiap hari
- 9) Melakukan aktifitas fisik setiap hari
- 10) Tidak merokok di dalam rumah

### 3. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu

Tolok ukur capaian sasaran diukur dengan 1 indikator yaitu Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa Hasil Jumlah indikator mutu yang dicapai sebagai berikut:

Tabel 2-7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu	Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa	Jumlah indikator mutu yang dicapai dibagi jumlah seluruh indikator mutu dikali 100%

Kinerja sasaran Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu dengan indikator Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2-8 Target dan Realisasi Kinerja

No	Indikator Sasaran	Baseline 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa	65	70	81,39	116,27	75	108,52

Analisis Ketercapaian Kinerja:

1. Persentase realisasi terhadap target tercapai 116,27 %
2. Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat kenaikan sebesar 3,49%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 dipengaruhi oleh kerjasama yang baik antara seluruh pihak di RS Jiwa Grhasia sehingga standar mutu dapat dicapai dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan.

Capaian kinerja dapat kita lihat pada tingkat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) RS Jiwa Grhasia DIY. Sehubungan dengan masih berprosesnya usulan rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal RS Jiwa Grhasia yang baru, maka untuk tahun 2021 Standar Pelayanan Minimal RS Jiwa Grhasia masih menggunakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2009. Pencapaian SPM telah dapat dicapai di 2020 dan yang di tahun kemarin belum tercapai dan dievaluasi sampai akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-9 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Jiwa Grhasia Tahun 2021

SPM		TARGET	CAPAIAN	KETERANGAN
<b>KEGAWATDARURATAN</b>				
1	Jam buka pelayanan gawat darurat	24 jam	24 jam	Tercapai
2	Angka dokter dan perawat pemberi layanan bersertifikat ACLS/PPGD/GELS ( <i>Advanced Cardiac Life Support / Pelatihan Penanganan Gawat Darurat / General Emergency Life Support</i> )	100%	69.27%	Tidak Tercapai
3	<i>Emergency Respon Time / ERT (IGD) ≤ 5 menit</i>	100%	92.12%	Tidak Tercapai
4	Kematian pasien ≤ 24 jam	≤ 2 per 1000 (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	0.000083	Tercapai
5	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	83.11%	Tercapai
<b>RAWAT JALAN</b>				
1	Pemberi pelayanan di poli jiwa	100%	100%	Tercapai
2	Ketersediaan pelayanan di RS Jiwa	a. Gangguan mental organik b. NAPZA c. Gangguan psikotik d. Gangguan ansietas - depresi e. Psikosomatis f. Psikiatri anak dan remaja g. Mental retardasi h. Psikometri i. Usia lanjut	a. Gangguan mental organik b. NAPZA c. Gangguan psikotik d. Gangguan ansietas - depresi e. Psikosomatis f. Psikiatri anak dan remaja g. Mental retardasi h. Psikometri i. Usia lanjut	Tercapai
3	Angka jam mulai pelayanan sesuai ketentuan (08.00)	100%	80.60%	Tidak tercapai
4	Waktu tunggu rawat jalan	≤ 60 menit	43	Tercapai
5	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60%	100.00%	Tercapai
6	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit	≥ 60%	100.00%	Tercapai
7	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	81.99%	Tercapai
<b>RAWAT INAP</b>				
1	Pemberi pelayanan di rawat inap: a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat minimal D3	100%	100.00%	Tercapai
2	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa penanggung jawab pasien rawat inap jiwa	100%	100.00%	Tercapai

3	Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	0	0	Tercapai
4	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24%	0.45%	Tidak tercapai
5	Kejadian pulang paksa	≤ 5%	0.64%	Tercapai
6	Ketersediaan pelayanan rawat inap di RS Jiwa	a. Gangguan mental organik b. NAPZA c. Gangguan psikotik d. Gangguan neurotik	a. Gangguan mental organik b. NAPZA c. Gangguan psikotik d. Gangguan neurotik	Tercapai
7	Kejadian adanya pasien bunuh diri	0	0	Tercapai
8	Angka <i>re-admission</i> pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan	≤10%	0.95%	Tercapai
9	Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa	≤ 6 minggu	1,75 minggu	Tercapai
10	Kejadian pasien melarikan diri	0	0	Tercapai
11	Persentase pasien yang mampu ADL	87%	89.47%	Tercapai
12	Angka reaksi transfusi	≤ 0,01%	0.00%	Tercapai
13	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60%	100.00%	Tercapai
14	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit	≥ 60%	100.00%	Tercapai
15	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	88.99%	Tercapai
<b>RAWAT INTENSIF</b>				
1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3%	0.71%	Tercapai
2	Lama perawatan di IRI > 5 hari	≤ 10%	15.70%	Tidak tercapai
3	Penanganan pasien gaduh gelisah > 48 jam	≤ 20%	11.42%	Tercapai
4	Kepatuhan jam <i>visite</i> dokter spesialis	≥ 80%	84.73%	Tercapai
<b>REHABILITASI MEDIK</b>				
1	Kejadian luka bakar pada tindakan <i>heating</i>	0	0	Tercapai
2	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	84.42%	Tercapai
<b>RADIOLOGI</b>				
1	Waktu tunggu hasil pemeriksaan radiologi	≤ 3 jam	12:29:30 AM	Tercapai
2	Pelaksanaan ekspertisi oleh Dokter Spesialis Radiologi	100%	100.00%	Tercapai
3	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	81.92%	Tercapai
<b>LABORATORIUM</b>				
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤140 menit	1:31:10 AM	Tercapai

2	Pelaksana ekspertisi oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik	100%	100.00%	Tercapai
3	Kejadian kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	0	0	Tercapai
4	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	81.50%	Tercapai
<b>REHABILITASI MENTAL</b>				
1	Angka ketidaksesuaian rehabilitan mendapatkan kegiatan sesuai hasil seleksi	≤ 5%	2.75%	Tercapai
2	Angka ketidakpatuhan rehabilitan menyelesaikan proses tahapan rehabilitasi	≤ 15%	8.50%	Tercapai
<b>FARMASI</b>				
1	Waktu tunggu pelayanan obat jadi untuk pasien rawat jalan	≤ 30 menit	12:21:08 AM	Tercapai
2	Waktu tunggu pelayanan obat racikan untuk pasien rawat jalan	≤ 60 menit	12:43:36 AM	Tercapai
3	Angka kesalahan pemberian obat	0%	0.02%	Tidak tercapai
4	Penulisan resep sesuai formularium	100%	99.30%	Tidak tercapai
5	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	79.21%	Tidak tercapai
<b>GIZI</b>				
1	Angka keterlambatan pemberian makanan kepada pasien	≤ 5%	0.00%	Tercapai
2	Angka sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien	≤ 10%	9.38%	Tercapai
3	Kejadian kesalahan pemberian diet	0	0.00%	Tercapai
<b>REKAM MEDIS</b>				
1	Angka ketidaklengkapan pengisian RM rawat jalan 24 jam setelah selesai pelayanan	0%	0.58%	Tidak tercapai
2	Angka ketidaklengkapan pengisian RM rawat inap	0%	19.95%	Tidak tercapai
3	Angka ketidaklengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	0%	14.05%	Tidak tercapai
4	Waktu penyediaan RM pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	9:48:00 AM	Tercapai
5	Waktu penyediaan RM pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	2:30:00 PM	Tercapai
6	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	79.41%	Tidak tercapai
<b>PENGELOLAAN LIMBAH</b>				
1	Baku mutu limbah cair	a. BOD ( <i>Biological Oxygen Demand</i> ) <	1.49	Tercapai

		30 mg/l		
		b. COD ( <i>Chemical Oxygen Demand</i> ) < 80 mg/l	11.31	
		c. TSS ( <i>Total Suspended Solid</i> ) < 30 mg/l	6.86	
		d. pH 6-9	7.89	
2	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100.00%	Tercapai
<b>PEMELIHARAAN SARPRAS RS</b>				
1	Kecepatan perbaikan kerusakan ringan ≤ 3 x 24 jam	90%	100.00%	Tercapai
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat medis	100%	100.00%	Tercapai
3	Kalibrasi alat medis tepat waktu	100%	100.00%	Tercapai
<b>ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN</b>				
1	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100.00%	Tercapai
2	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100.00%	Tercapai
3	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100.00%	Tercapai
4	<i>Cost recovery</i>	≥ 40%	125.29%	Tercapai
5	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100.00%	Tercapai
6	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap ≥ 2 jam	≤ 10%	0.00%	Tercapai
7	Ketepatan waktu pemberian jasa layanan sesuai kesepakatan waktu	100%	100.00%	Tercapai
8	Kecepatan respon terhadap komplain	≥ 75%	100.00%	Tercapai
9	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	83.23%	Tercapai
<b>AMBULANS JENAZAH</b>				
1	Waktu pelayanan ambulans jenazah	24 jam	24 jam	Tercapai
2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulans jenazah di rumah sakit ≤ 30 menit	100%	100.00%	Tercapai
<b>PEMULASARAAN JENAZAH</b>				
1	Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 jam	12:17:36 AM	Tercapai
<b>PEMELIHARAAN LINEN</b>				
1	Kejadian linen yang hilang	0	0.00%	Tercapai
2	Angka ketidaktepatan waktu pengembalian linen untuk instalasi rawat inap ≤ 24 jam	0%	5.00%	Tidak tercapai
<b>PELAYANAN PASIEN PBI</b>				
1	Pelayanan terhadap pasien PBI dan pasien Dinas Sosial yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%	99.94%	Tidak tercapai

DIKLATLITBANG				
1	Angka karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60%	16.20%	Tidak tercapai
2	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	82.34%	Tercapai
<b>PPI</b>				
1	Komite PPI terlatih	≥ 75%	71.31%	Tidak tercapai
2	Angka penggunaan APD (Alat Pelindung Diri)	100%	97.91%	Tidak tercapai
3	Angka infeksi HAIs ( <i>Healthcare Associated Infections</i> ) ISK di wisma rawat inap	≤ 5%	0.00%	Tercapai
4	Angka phlebitis	≤ 5%	0.00%	Tercapai
5	Angka ketidakpatuhan cuci tangan	≤ 15%	0.90%	Tercapai

Indikator yang digunakan untuk penilaian IKU terdiri dari indikator yang ada di SPM RS Jiwa Grhasia (berdasarkan Pergub DIY no 25 tahun 2009 tentang SPM RS Jiwa Grhasia) dan indikator BLUD (berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan nomor 36 tahun 2016 tentang indikator kinerja BLUD). Faktor pendukung tercapainya IKU RS Jiwa Grhasia adalah kerjasama yang baik antara seluruh pihak di RS Jiwa Grhasia sehingga standar mutu dapat dicapai dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan.

#### 4. Sasaran Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Paru Yang Bermutu

Tolok ukur capaian sasaran diukur dengan 1 indikator yaitu Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan.

Tabel 2-10 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Paru yang Bermutu	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan	Jumlah indikator mutu yang memenuhi standar dibagi jumlah seluruh indikator mutu dikalikan 100

Kinerja sasaran Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Paru yang Bermutu dengan indikator Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Paru pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2-11 Target dan Realisasi Kinerja

No	Indikator Sasaran	Baseline 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Pemenuhan	77,2	78,9	81.39	116.27	81,3	

Standar Mutu Pelayanan						
------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Ketercapaian Kinerja:

1. Persentase realisasi terhadap target tercapai lebih dari 100%
2. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 dipengaruhi oleh kerjasama yang baik antara seluruh pihak di RS Paru Respira sehingga standar mutu dapat dicapai dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan.

Pemenuhan standar mutu pelayanan berdasarkan pada capaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Paru Respira sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Khusus Paru Respira. Adapun rincian indikator mutu yang memenuhi standar sebagai berikut:

Tabel 2-12 Standar Mutu RS Paru Respira Memenuhi Standar Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH INDIKATOR	MEMENUHI STANDAR	
			Jumlah	%
1	Gawat darurat	8	8	100
2	Rawat Jalan	8	5	62,5
3	Rawat Inap	13	11	84,6
4	Radiologi	7	7	100
5	Lab.Patologi Klinik	9	9	100
6	Rehabilitasi Medik/Fisioterapi	5	5	100
7	Farmasi	7	5	71,4
8	Gizi	6	6	100
9	Rekam Medik	8	6	75
10	Pengelolaan Limbah	5	5	100
11	Administrasi dan Manajemen	16	14	87,5
12	Ambulans/Kereta Jenazah	7	6	85,7
13	Pemulasaran Jenazah	7	1	14,2
14	Pelayanan Pemeliharaan RS	5	3	60
15	Pelayanan Laundry	6	0	0
16	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	6	6	100
	<b>JUMLAH</b>	123	95	77,2

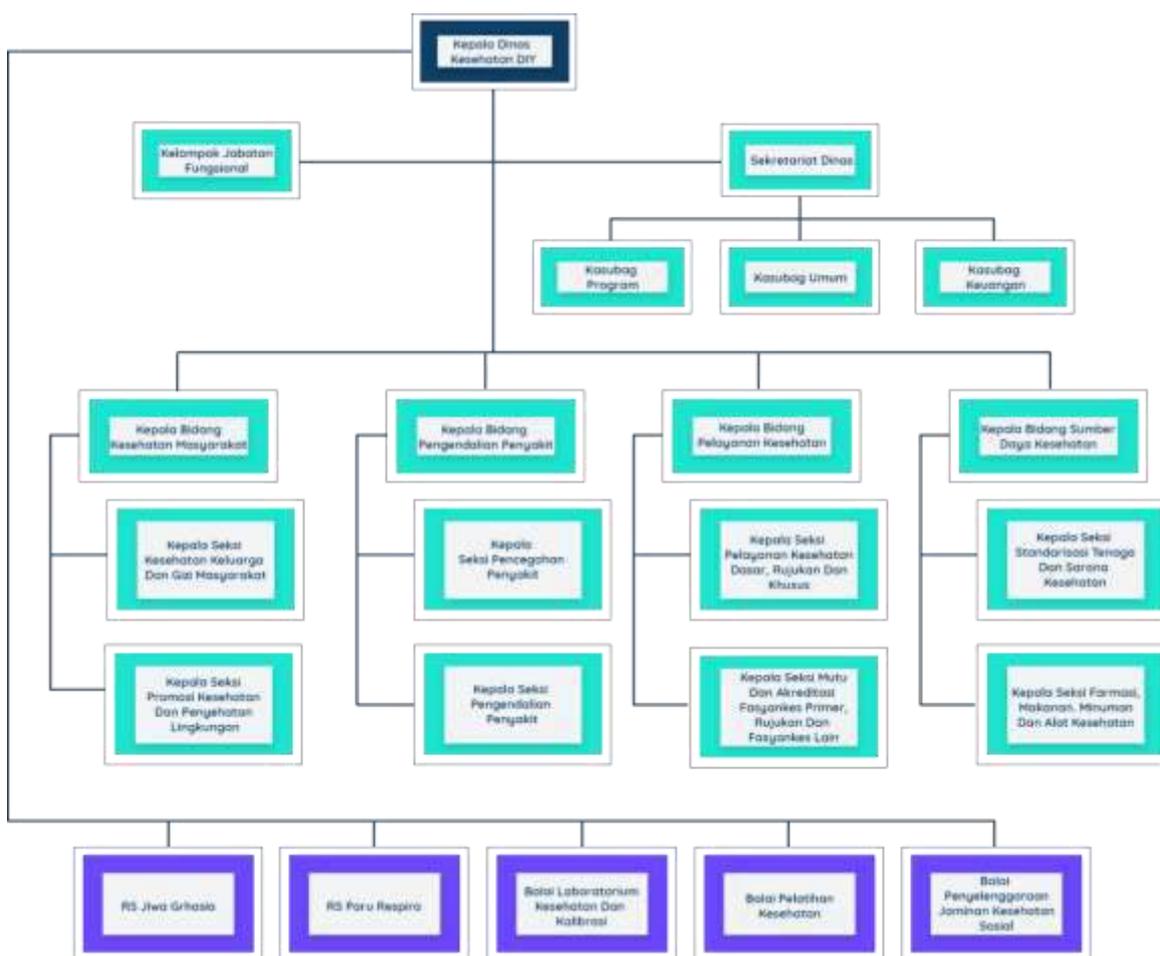
Sasaran Strategis RS Paru Respira tahun 2017-2022 adalah Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Paru yang bermutu dengan indikator Persentase pemenuhan Standar mutu Pelayanan. Faktor pendukung tercapainya adalah kerjasama yang baik antara seluruh pihak di RS Paru Respira sehingga standar mutu dapat dicapai dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan.

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020- 2024 mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan”.Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam

tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam Peningkatan Kualitas manusia Indonesia. Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005 - 2025. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH), menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

Gambar 2.2 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan



Indikator pembangunan kesehatan yang ingin dicapai dalam RPJMN 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak
2. Meningkatnya status gizi masyarakat
3. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular
4. Meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan meningkatnya pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas
5. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk

Stategi Arah kebijakan RPJMN 2020-2024 bidang Kesehatan:

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
2. percepatan perbaikan gizi masyarakat
3. peningkatan pengendalian penyakit
4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
5. Penguatan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Proses pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemda DIY secara umum menunjukkan hasil positif di berbagai segi kehidupan masyarakat. Namun berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (PPLH), pada pasal 15 disebutkan bahwa instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP), masih terdapat beberapa isu lingkungan yang harus mendapatkan perhatian. Dari proses pra pelingkupan didapatkan daftar panjang isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 129 isu, yang selanjutnya melalui proses pelingkupan didapatkan daftar pendek isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 4 isu yaitu :

1. Stunting
2. Angka Kematian Ibu dan Bayi
3. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
4. Penguatan pelayanan kesehatan, pengawasan obat dan makanan

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2009-2029 dan Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RT/RW Kabupaten Bantul 2010-2030, Dinkes DIY telah berupaya menyesuaikan dengan ketentuan RT/RW dimaksud dalam rangka mengembangkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

a. Faktor Penghambat Pelayanan

Untuk pelayanan kesehatan rujukan di RS adalah

- Rasio persebaran jumlah dan kelas rumah sakit yang belum merata terutama untuk kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo berimplikasi pada akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan rumah sakit
- Adanya kebijakan sistem regionalisasi rujukan sehingga berpengaruh pada kabupaten kota yang belum memiliki rumah sakit rujukan yang sesuai klasifikasi dan kompetensi yang diharapkan oleh masyarakat

b. Faktor Pendorong Pelayanan

- sumber daya kesehatan
- Adanya desentralisasi bidang kesehatan
- Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan
- Adanya pembiayaan kesehatan
- Institusi pendidikan kesehatan yang memadai
- Masyarakat yang berdaya
- Kebijakan lokal sistem rujukan berbasis kompetensi

Hasil capaian indikator Renstra Dinas Kesehatan DIY tidak lepas dari kontribusi hasil capaian Renstra Dinas Kesehatan kabupaten/ kota. Sebaliknya hasil tersebut juga telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian Kesehatan RI.

Tabel 2-13. Tabel Target dan Capaian Kinerja 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga	%	100	100	100
2	Persentase Pelayanan kesehatan yang terakreditasi	%	70.99	75.19	105.92
3	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa	%	78.9	78.9	100
4	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan*	%	70	81.39	116.27

Catatan: \* Kesehatan Paru

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan DIY, tidak dapat terlepas dari berbagai isu penting dan strategis yang berkembang baik pada tatanan Pemerintah Pusat maupun tatanan Daerah.

Isu-isu pokok dan atau strategis tersebut yang menjadi masalah prioritas adalah:

- Gizi dan kesehatan ibu dan anak, yang meliputi *Stunting*, WUS KEK (Wanita Usia Subur Kekurangan Energi Kronik), Kematian Ibu, dan Kematian Bayi.
- Penyakit tidak menular yang meliputi *Diabetes* Melitus, PJP (Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah)/Hipertensi, Gangguan Jiwa, Kanker (Ca), dan Napza.
- Penyakit menular, yang meliputi HIV AIDS, Tuberkulosis, DBD, Pneumonia termasuk penyakit potensial KLB.
- Pelayanan kesehatan, yang meliputi akreditasi dan sumber daya manusia, termasuk kesiapan dalam penanganan bencana
- Pelayanan kesehatan tradisional, yang merupakan amanahkeistimewaan

Selanjutnya Dinas Kesehatan DIY memandang perlu untuk melakukan langkah-langkah responsif terhadap isu-isu tersebut, selain memperhatikan arah kebijakan pembangunan secara umum. Implementasi dari langkah responsif tersebut selanjutnya dituangkan dalam usulan program/kegiatan Dinas Kesehatan DIY tahun 2023.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.6. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan awal RKPD telah sesuai dengan kebutuhan, tetapi dari segi anggaran yang direncanakan, serta indikator keluaran dan hasil, masih perlu dilakukan perubahan. Perubahan rencana anggaran ini dibutuhkan karena terdapat perubahan kebutuhan menyesuaikan kondisi masyarakat sasaran serta kebijakan. Review ini membantu memetakan selisih antara kebutuhan dengan rancangan awal RKPD.

Tabel 2-14 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan DIY

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	56,918,259,670.00	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	35,875,145,416.00
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	40,931,000.00	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	40,931,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : 1. Renstra 2. Renja 2023 3. ROPK 2022 4. Perubahan Renja 2022	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	31,929,000.00	1. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : 1. Renstra 2. Renja 2023 3. ROPK 2022 4. Perubahan Renja 2022	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	31,929,000.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		DPA perubahan Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : 1. DPA	1 dokumen 1 dokumen	2,281,000.00	DPA perubahan Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : 1. DPA	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	2,281,000.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan 02. Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD	1 dokumen 1 dokumen	6,721,000.00	01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan 02. Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	6,721,000.00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		tercapainya administrasi Keuangan Dinkes DIY	100%	54,548,814,005.00	tercapainya administrasi Keuangan Dinkes DIY	100%	33,471,222,401.00

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKP			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	54,472,614,005.00	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	33,395,022,401.00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran Honor Pengelola Keuangan	12 bulan	70,200,000.00	Pembayaran Honor Pengelola Keuangan	12 bulan	70,200,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Tahunan SKPD	1 dokumen	1,662,000.00	Laporan Tahunan SKPD	1 dokumen	1,662,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan Bulanan/ Fungsional Laporan Semester/Prognosis	24 dokumen 1 dokumen	4,338,000.00	Laporan Bulanan/ Fungsional Laporan Semester/Prognosis	24 dokumen 1 dokumen	4,338,000.00
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		tercapainya pengamanan barang milik daerah	100%	16,400,000.00	tercapainya pengamanan barang milik daerah	100%	16,400,000.00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Pembayaran PBB Dinkes DIY	1 tahun	2,000,000.00	Pembayaran PBB Dinkes DIY	1 tahun	2,000,000.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Pembayaran Honor pengurus barang	36 OB	14,400,000.00	Pembayaran Honor pengurus barang	36 OB	14,400,000.00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	9,315,000.00	tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	9,315,000.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pengisian tabung pemadam kebakaran dan BBM cold room	1 paket	9,315,000.00	Pengisian tabung pemadam kebakaran dan BBM cold room	100%	9,315,000.00

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKP			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		tercapainya Administrasi Umum perkantoran Dinkes DIY	100%	268,309,000.00	tercapainya Administrasi Umum perkantoran Dinkes DIY	100%	277,674,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Pembelian alat listrik Dinkes DIY	1 paket	4,368,000.00	Pembelian alat listrik Dinkes DIY	1 paket	4,368,000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pembelian ATK Pembelian Laptop Pembelian PC	17 Jenis 2 Unit 2 Unit	22,153,000.00	Pembelian ATK Pembelian Laptop Pembelian PC	17 Jenis 2 Unit 2 Unit	28,208,000.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Pembelian alat kebersihan	1 paket	11,440,000.00	Pembelian alat kebersihan	1 paket	11,440,000.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Logistik coldroom Pengisian tabung pemadam kebakaran	270 liter 1 paket	12,980,000.00	Logistik coldroom Pengisian tabung pemadam kebakaran	270 liter 1 paket	12,980,000.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan	1 paket	11,740,000.00	Barang cetakan dan penggandaan	1 paket	14,740,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan surat kabar	12 bulan	4,416,000.00	Bahan bacaan surat kabar	12 bulan	4,726,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyediaan makan minum rapat dan perjalanan dinas	1 tahun	103,212,000.00	Penyediaan makan minum rapat dan perjalanan dinas	1 tahun	103,212,000.00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		pengembangan aplikasi/ website	1 paket	98,000,000.00	pengembangan aplikasi/ website	1 paket	98,000,000.00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>		Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	38,774,000.00	Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	52,534,000.00

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKP			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
<b>Pemerintah Daerah</b>		Daerah					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		AC PSC Komputer Laptop	1 unit 1 unit 2 unit	33,150,000.00	AC PSC Komputer Laptop faksimile	1 unit 1 unit 2 unit 1 unit	46,910,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		pembelian tangga	2 unit	5,624,000.00	pembelian tangga	2 unit	5,624,000.00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100%	1,516,375,665.00	Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100%	1,513,228,015.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Surat menyurat terproses dengan baik	1 paket	1,500,000.00	Surat menyurat terproses dengan baik	1 paket	1,500,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran tagihan air, listrik, telepon, fax dan zoom	1 tahun	548,115,000.00	Pembayaran tagihan air, listrik, telepon, fax dan zoom	1 tahun	598,110,000.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Pembayaran honor pengelola keuangan dan pengurus barang, honor tenaga non PNS, cleaning service dan satpam	12 bulan	966,760,665.00	Pembayaran honor pengelola keuangan dan pengurus barang, honor tenaga non PNS, cleaning service dan satpam	12 bulan	913,618,015.00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100%	479,341,000.00	tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100%	493,841,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		Kir Pick Up Pembayaran STNK 27 roda 2 dan 23 roda 4 Terpelihara kendaraan dinas 27 roda 2 dan 23 roda 4	2 kali 1 tahun 1 paket	218,091,000.00	Kir Pick Up Pembayaran STNK 27 roda 2 dan 23 roda 4 Terpelihara kendaraan dinas 27 roda 2 dan 23 roda 4	2 kali 1 tahun 1 paket	240,591,000.00

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
Jabatan							
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpelihara perlengkapan dan peralatan kantor	1 tahun	111,250,000.00	Terpelihara perlengkapan dan peralatan kantor	1 tahun	103,250,000.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpelihara gedung kantor Terpelihara lift	1 Tahun 4 kali	150,000,000.00	Terpelihara gedung kantor Terpelihara lift	1 Tahun 4 kali	150,000,000.00
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	62.84%	56,010,676,500.00	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	62.84%	64,641,385,000.00
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>		Jumlah alat kesehatan, obat, vaksin yang didistribusikan dan sarana distribusi makanan minuman yang di bina sesuai kebutuhan	5 Kab/kota	63,698,000.00	Jumlah alat kesehatan, obat, vaksin yang didistribusikan dan sarana distribusi makanan minuman yang di bina sesuai kebutuhan	5 kab/kota	2,439,285,000.00
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Obat, Vaksin dan Alat kesehatan terdistribusi ke Kabupaten/Kota Sarana Produksi dan Distribusi Makanan yang di bina sesuai standar	5 Kab/Kot 30 sarana	63,698,000.00	Obat, Vaksin dan Alat kesehatan terdistribusi ke Kabupaten/Kota Sarana Produksi dan Distribusi Makanan yang di bina sesuai standar	5 Kab/Kot 30 sarana	164,054,000.00
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Tersedianya kebutuhan obat untuk pendukung perbaikan gizi dan KIA	1 paket		Tersedianya kebutuhan obat untuk pendukung perbaikan gizi dan KIA	1 paket	2,275,231,000.00

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		tercapainya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100%	55,907,923,500.00	tercapainya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100%	62,163,045,000.00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		BKK pengadaan Alat Kesehatan RSUP Saptosari hibah PMI Obat Bufferstock dan Perbekes tersedia Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan penyediaan peralatan Covid-19 reagen pemeriksaan Covid-19	1 paket 1 tahun 1 paket 100% 9 macam 1 paket	50,375,913,000.00	BKK pengadaan Alat Kesehatan RSUP Saptosari hibah PMI Obat Bufferstock dan Perbekes tersedia Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan penyediaan peralatan Covid-19 reagen pemeriksaan Covid-19 promosi pelaksanaan imunisasi	1 tahun 1 paket 100% 9 macam 1 paket 80% 5 kab/kota	53,495,696,000.00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Penyediaan Epidemiologi <24 jam	100%	109,805,000.00	Penyediaan Epidemiologi <24 jam	407 orang	737,805,000.00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		Anak <1th mendapat imunisasi lengkap Anak baduta mendapat imunisasi lanjutan/booster persentase K4 Persentase KN1	95% 90% 77% 89%	198,000,000.00	Anak <1th mendapat imunisasi lengkap Anak baduta mendapat imunisasi lanjutan/booster persentase K4 Persentase KN1	- - 4 Dokumen 100% 100%	497,507,000.00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		Persentase Puskesmas PKPR	73%	85,166,000.00	Persentase Puskesmas PKPR	73%	85,166,000.00

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKP			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		Persentase Puskesmas Santun Lansia	94%	22,567,000.00	Persentase Puskesmas Santun Lansia	94%	22,567,000.00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Persentase Penurunan Balita Kurus Persentase Penurunan Ibu Hamil KEK	2 dokumen 100% 100%	211,416,000.00	Persentase Penurunan Balita Kurus Persentase Penurunan Ibu Hamil KEK	2 dokumen 100% 100%	3,618,501,000.00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja Puskesmas melaksanakan Kesehatan Olahraga	1 dokumen 100%	29,610,000.00	Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja Puskesmas melaksanakan Kesehatan Olahraga	1 dokumen 100%	67,390,000.00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		BKK jambanisasi Desa/Kelurahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kab/Kota dilakukan pembinaan Kab/Kota Sehat (KKS) Sekolah (SD, SMP, SLTA) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	4 kab 180 desa /kelurahan 5 kab / kota 2365 sekolah	29,935,000.00	BKK jambanisasi Desa/Kelurahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kab/Kota dilakukan pembinaan Kab/Kota Sehat (KKS) Sekolah (SD, SMP, SLTA) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	4 kab/kota 100% 1 dokumen 5 kab / kota 5 kab / kota	29,935,000.00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kajian Pemanfaatan media dan pembuatan media promosi kesehatan Kampanye GERMAS Media Promosi Film/ Iklan Layanan Masyarakat Penerbitan Majalan Mensana	5 kab / kota 5 kab / kota 5 kab / kota 5 kab / kota	536,506,000.00	Kajian Pemanfaatan media dan pembuatan media promosi kesehatan Kampanye GERMAS Media Promosi Film/ Iklan Layanan Masyarakat Penerbitan Majalan Mensana	2 dokumen 100% 100%	1,048,230,000.00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan		DPS yang tersosialisasi ISTC (International Standart for Tuberculosis Care)	125 DPS 1 tahun 5 kab/kota	1,523,609,500.00	DPS yang tersosialisasi ISTC (International Standart for Tuberculosis Care)	125 DPS 1 tahun 5	1,724,935,000.00

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
Tidak Menular		hibah KPAD Kab/Kota yang melaksanakan PANDU PTM Kab/Kota yang melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Program Hepatitis Kab/Kota yang melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Program PISP/ Diare Kab/Kota yang melaksanakan pengendalian kasus malaria Kab/Kota yang melaksanakan posbindu sesuai standar Kab/Kota yang melaksanakan skrining jiwa Kab/Kota yang melakukan gerakan 1 rumah 1 jumantik Kab/Kota yang melakukan "pemahaman stigma dan diskriminasi" HIV AIDS Klinik yang melaksanakan strategi DOTS	5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 100 klinik		hibah KPAD -Kab/Kota yang melaksanakan PANDU PTM -Kab/Kota yang melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Program Hepatitis -Kab/Kota yang melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Program PISP/ Diare -Kab/Kota yang melaksanakan pengendalian kasus malaria -Kab/Kota yang melaksanakan posbindu sesuai standar -Kab/Kota yang melaksanakan skrining jiwa -Kab/Kota yang melakukan gerakan 1 rumah 1 jumantik -Kab/Kota yang melakukan "pemahaman stigma dan diskriminasi" HIV AIDS -Klinik yang melaksanakan strategi DOTS -cakupan penemuan dan pengobatan TBC (Treatment Coverage) -jumlah kab/kota yang mencapai eliminasi malaria -presentase orang dengan HIV (OD HIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 100 klinik 15 kali	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinkes)		FKTL yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana dan jaminan kesehatan	10 RS/FKTL	7,430,000.00	FKTL yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana dan jaminan kesehatan	10 RS/FKTL	7,430,000.00

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab/Kota yang merespon peringatan dini KLB (alert system) minimal 95% Sasaran yang mendapat Imunisasi Covid-19	100% 80%	2,107,513,000.00	Kab/Kota yang merespon peringatan dini KLB (alert system) minimal 95% Sasaran yang mendapat Imunisasi Covid-19	100%	208,740,000.00
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		Fasyankes yang dibina dalam memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar Klinik mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Puskesmas mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan dasar RS mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan	45 fasyankes 40 klinik 121 puskesmas 80 RS	315,953,000.00	Fasyankes yang dibina dalam memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar Klinik mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Puskesmas mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan dasar RS mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan	1 paket 45 fasyankes 40 klinik 121 puskesmas 80 RS	316,803,000.00
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Pengembangan pelayanan SPGDT	100%	354,500,000.00	Pengembangan pelayanan SPGDT	100%	293,700,000.00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Sudah dikunjungi Dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	815000 keluarga		Jumlah Keluarga yang Sudah dikunjungi Dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	809.313 Keluarga	8,640,000.00
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>		Pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan	100%	5,550,000.00	Pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan	100%	5,550,000.00
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Buku Data Kesehatan Tahun 2021	1 dokumen 1 dokumen	5,100,000.00	Buku Data Kesehatan Tahun 2021 Buku Profil Kesehatan Tahun 2021	1 dokumen	5,100,000.00

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
		Buku Profil Kesehatan Tahun 2021 Jumlah Materi tentang informasi kesehatan yang lengkap	180 materi		Jumlah Materi tentang informasi kesehatan yang lengkap	1 dokumen 180 materi	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah pengelolaan sistem informasi kesehatan	6 sistem informasi	450,000.00	Jumlah pengelolaan sistem informasi kesehatan	6 sistem informasi	450,000.00
<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>		Fasilitas Pelayanan Kesehatan Mendapatkan Pembinaan Mutu	100%	33,505,000.00	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Mendapatkan Pembinaan Mutu	100%	33,505,000.00
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Klinik Pratama yang mendapatkan pembinaan mutu Laboratorium yang mendapatkan pembinaan mutu Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu Rumah Sakit yang mendapatkan pembinaan mutu	30 Klinik Pratama 5 laboratorium 121 Puskesmas 80 Rumah Sakit	33,505,000.00	Klinik Pratama yang mendapatkan pembinaan mutu Laboratorium yang mendapatkan pembinaan mutu Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu Rumah Sakit yang mendapatkan pembinaan mutu	30 Klinik Pratama 5 laboratorium 121 Puskesmas 80 Rumah Sakit	33,505,000.00
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	62.84%	73,130,000.00	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	63%	73,130,000.00
<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis</b>		Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia	100%	73,130,000.00	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	73,130,000.00

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
<b>Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>		Kesehatan					
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		FKTP dan FKTL yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana	12 bulan	73,130,000.00	FKTP dan FKTL yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana	12 bulan	73,130,000.00
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>		Persentase kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai standar	86.48%	1,958,000.00	Persentase kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai standar	100%	1,958,000.00
<b>Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</b>		Sarana produksi dan distribusi obat tradisional yang mendapatkan pembinaan sesuai dengan standar	35 sarana	1,958,000.00	Sarana produksi dan distribusi obat tradisional yang mendapatkan pembinaan sesuai dengan standar	35 sarana	1,958,000.00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional		Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional yang mendapatkan pembinaan	35 sarana	1,958,000.00	Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional yang mendapatkan pembinaan	35 sarana	1,958,000.00
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>		Persentase peningkatan Budaya tak benda yang dilestarikan	20%	626,313,000.00	Persentase peningkatan Budaya tak benda yang dilestarikan	20%	532,366,000.00
<b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>		Terselenggaranya pengembangan pelayanan kesehatan tradisional	100%	626,313,000.00	Terselenggaranya pengembangan pelayanan kesehatan tradisional	100%	532,366,000.00

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional		1. Kajian Pengembangan Kesehatan Tradisional 2. Pelatihan Penyehat Tradisional Terlatih Jamu Herbal 3. Pelatihan Penyehat Tradisional Terlatih Pijat Refleksi 4. Penyehat Tradisional mendapatkan pembinaan legalitas pelayanan 5. Workshop Sainifikasi Jamu 6. Terkoordinasinya (Asosiasi Hatra, SP3T, Sainifikasi Jamu dan Layanan Kestrad) 7. Pengembangan Yankestraddi Dinkes DIY 8.a. Tersosialisasinya Kebijakan Kesehatan Tradisional 8.b. Konsultasi Teknis Kesehatan Tradisional 8.c. Pameran Jamu Herbal dan Kestrad DIY 8.d. Lomba Film, Vlog, dan liputan Kestrad 8. Promosi Kesehatan Tradisional	2 dokumen 40 orang 40 orang 30 orang 30 orang 1 dokumen 2 dokumen 1 event 1 event 1 event 3 event 0 event	626,313,000.00	1. Kajian Pengembangan Kesehatan Tradisional 2. Pelatihan Penyehat Tradisional Terlatih Jamu Herbal 3. Pelatihan Penyehat Tradisional Terlatih Pijat Refleksi 4. Penyehat Tradisional mendapatkan pembinaan legalitas pelayanan 5. Workshop Sainifikasi Jamu 6. Terkoordinasinya (Asosiasi Hatra, SP3T, Sainifikasi Jamu dan Layanan Kestrad) 7. Pengembangan Yankestraddi DinkesDIY 8.a. Tersosialisasinya Kebijakan Kesehatan Tradisional 8.b. Konsultasi Teknis Kesehatan Tradisional 8.c. Pameran Jamu Herbal dan Kestrad DIY 8.d. Lomba Film, Vlog, dan liputan Kestrad 8. Promosi Kesehatan Tradisional	1 event 3 event 2 dokumen 20 orang 20 orang 30 orang 30 orang 1 dokumen 1 dokumen 1 event	532,366,000.00
<b>Bapel Jamkessos</b>							
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
<b>DAERAH PROVINSI</b>							
<b>1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				1,986,351,878.00			31,860,000.00
1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		-/Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN/-	-/1 Tahun/-	1,954,491,878.00		-	-
1.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		-/Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD/-	100 persen/ 100 persen/ 1 Tahun	31,860,000.00	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah /Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan OPD	100 persen/10 0 persen/1 Tahun	31,860,000.00
<b>1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				9,060,000.00			9,060,000.00
1.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		-/Terlaksananya penatusahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku/-	100 persen/ 1 Tahun/ 1 Tahun	9,060,000.00	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/Terlaksananya penatusahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 persen/ 1 Tahun/ 1 Tahun	9,060,000.00
<b>1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				554,436,000.00			522,483,000.00
1.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		-/Tersedianya Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor/-	100 persen/ 1 Tahun/6 jenis	6,967,000.00	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran//Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Tersedianya Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	100 persen/ 1 Tahun/6 jenis	6,967,000.00

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-/Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan protokol kesehatan kantor, Tersedianya perlengkapan protokol kesehatan kantor/-	100 persen/ 1 Tahun/ 51 jenis, 1 tahun	134,509,000.00	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran//Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Tersedianya perlengkapan protokol kesehatan kantor, Tersedianya perlengkapan protokol kesehatan kantor	100 persen/ 1 Tahun/ 51 jenis, 1 tahun	134,509,000.00
1.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		-/Tersedianya peralatan rumah tangga/-	100 persen/ 1 Tahun/6 jenis	25,790,000.00	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran//Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Tersedianya peralatan rumah tangga	100 persen/ 1 Tahun/6 jenis	22,142,000.00
1.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		-/Tersedianya bahan logistik kantor berupa APAR yang siap digunakan, Tersedianya jumlah bahan logistik kantor berupa penyediaan extrafooding bagi pegawai/-	100 persen/ 1 Tahun/ 5 jenis, 40 orang	84,216,000.00	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran//Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Tersedianya bahan logistik kantor berupa APAR yang siap digunakan, Tersedianya jumlah bahan logistik kantor berupa penyediaan extrafooding bagi pegawai	100 persen/ 1 Tahun/ 5 jenis, 40 orang	84,216,000.00
1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		-/Tersedianya barang cetakan dan penggandaan/-	100 persen/ 1 Tahun/ 1 Tahun	40,492,000.00	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran//Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 persen/ 1 Tahun/ 1 Tahun	40,490,000.00
1.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		-/Langganan surat dan majalah/-	100 persen/ 1 Tahun/ 2 jenis	2,580,000.00	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Langganan surat dan majalah	100 persen/ 1 Tahun/ 1 jenis	1,200,000.00
1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-/Tersedianya makanan dan minuman rapat, Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi/-	100 persen/ 1 Tahun/ 1 Tahun	259,882,000.00	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Tersedianya makanan dan	100 persen/ 1 Tahun/ 1 Tahun	232,959,000.00

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKP			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
					minuman rapat, Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi		
<b>1.02.01.1.07</b> <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				30,000,000.00			30,000,000.00
1.02.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud		-/Tersedianya sistem aplikasi pelayanan penjaminan kesehatan Bapel Jamkessos DIY/-	100 persen/ 1 Tahun/ 1 Tahun	30,000,000.00	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terlaksanakannya Pengadaan Peralatan Kantor/Tersedianya sistem aplikasi pelayanan penjaminan kesehatan Bapel Jamkessos DIY	100 persen/ 1 Tahun/ 1 Tahun	30,000,000.00
<b>1.02.01.1.08</b> <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				481,256,844.00			498,337,600.00
1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		-/Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik/-	100 persen/ 1 Tahun/ 1 Tahun	99,650,400.00	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terlaksananya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah/Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 persen/ 1 Tahun/ 1 Tahun	103,500,400.00
1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		-/Arsip kantor dikelola dengan baik, Keamanan kantor terjaga dengan baik, Kebersihan kantor terjaga dengan baik, Penyediaan pengelolaan air limbah, Penyediaan retribusi sampah/-	100 persen/ 1 Tahun/12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan	381,606,444.00	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terlaksananya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah/Arsip kantor dikelola dengan baik, Keamanan kantor terjaga dengan baik, Kebersihan kantor terjaga dengan baik, Penyediaan pengelolaan air limbah, Penyediaan retribusi sampah	100 persen/ 1 Tahun/12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan	394,837,200.00

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				91,549,000.00			91,549,000.00
1.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-/Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda dua yang tepatwaktu, Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda empat yang tepatwaktu, Kendaraan dinas operasional roda dua terpelihara sesuai RKBMD, Kendaraan dinas operasional roda empat terpelihara sesuai RKBMD/-	100 persen/100 persen/3 unit, 3 unit, 3 unit	57,549,000.00	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran//Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda dua yang tepatwaktu, Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda empat yang tepatwaktu, Kendaraan dinas operasional roda dua terpelihara sesuai RKBMD, Kendaraan dinas operasional roda empat terpelihara sesuai RKBMD	100 persen/100 persen/3 unit, 3 unit, 3 unit	57,549,000.00
1.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-/Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya pada gedung BCB, Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya pada gedung non BCB/-	100 persen/100 persen/1 unit, 3 unit	30,000,000.00	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran//Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya pada gedung BCB, Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya pada gedung non BCB	100 persen/100 persen/1 unit, 3 unit	30,000,000.00
1.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-/Terpeliharanya jaringan instalasi listrik/-	100 persen/100 persen/1 Tahun	4,000,000.00	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran//Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Terpeliharanya jaringan instalasi listrik	100 persen/100 persen/1 Tahun	4,000,000.00

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>							
<b>1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>				69,518,620,960.00			43,240,714,965.00
1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		-/Cakupan Jaminan Kesehatan Penyangga Cakupan Jaminan Kesehatan Preventif Cakupan Jaminan Kesehatan Rehabilitatif/-	-/100 Persen 12 persen 25 persen/-	69,518,620,960.00	Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular/ Prosentase jenis layanan Jamkessos diakses masyarakat/ Cakupan Jaminan Kesehatan Penyangga Cakupan Jaminan Kesehatan Preventif Cakupan Jaminan Kesehatan Rehabilitatif	62,84 Persen/ 100 Persen / 100 Persen 12 persen 25 persen	43,240,714,965.00
<b>Balai Labkes dan Kalibrasi</b>							
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 34,704,091,001</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 36,269,210,537</b>
<b>1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp 3,911,695,524</b>	<b>Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp 35,760,000</b>

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK	12 Bulan	Rp 3,875,935,524			Rp -
1.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Penyediaan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan	Rp 35,760,000	Penyediaan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan	Rp 35,760,000
<b>1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>		<b>Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp 15,000,000</b>	<b>Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp 15,000,000</b>
1.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Pembayaran Honorarium Pengurus Barang Pembantu	12 Bulan	Rp 15,000,000	Pembayaran Honorarium Pengurus Barang Pembantu	12 Bulan	Rp 15,000,000
<b>1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp 155,064,000</b>	<b>Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp 155,064,000</b>
1.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan Makanan Minuman Harian Umum (Extrafooding)	12 Bulan	Rp 155,064,000	Penyediaan Makanan Minuman Harian Umum (Extrafooding)	12 Bulan	Rp 155,064,000
<b>1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp 24,342,837,591</b>	<b>Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp 24,342,837,591</b>
1.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Komputer Monitor UPS	6 Unit 1 Unit 2 Unit	Rp 132,018,000	Komputer Monitor UPS	6 Unit 1 Unit 2 Unit	Rp 132,018,000
1.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Buku SNI	2 Buku	Rp 7,859,591	Buku SNI	2 Buku	Rp 7,859,591
1.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terbangunnya Gedung Laboratorium	1 Unit	Rp 24,166,960,000	Terbangunnya Gedung Laboratorium	1 Unit	Rp 24,166,960,000

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
1.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		AC Penangkal Petir	1 Unit 1 Paket	Rp 36,000,000	AC Penangkal Petir	1 Unit 1 Paket	Rp 36,000,000
<b>1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp 1,136,441,886</b>	<b>Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp 1,151,000,850</b>
1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Belanja Telepon, Air, Listrik dan Fax	12 Bulan	Rp 526,888,800	Belanja Telepon, Air, Listrik dan Fax	12 Bulan	Rp 526,888,800
1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Pembayaran Jasa Keamanan Kantor Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor Pembayaran Jasa Pencucian Alat-Alat Laboratorium	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Rp 609,553,086	Pembayaran Jasa Keamanan Kantor Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor Pembayaran Jasa Pencucian Alat-Alat Laboratorium	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Rp 624,112,050
<b>1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp 193,052,000</b>	<b>Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp 193,052,000</b>
1.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan Gedung Bangunan Tempat Kerja	12 Bulan	Rp 193,052,000	Pemeliharaan Gedung Bangunan Tempat Kerja	12 Bulan	Rp 193,052,000
<b>1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>		<b>Peningkatan Kunjungan Pelanggan</b>	<b>220 Pelanggan</b>	<b>Rp 4,950,000,000</b>	<b>Peningkatan Kunjungan Pelanggan</b>	<b>220 Pelanggan</b>	<b>Rp 10,376,496,096</b>
1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Akreditasi Laboratorium Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengembangan Sumber Daya	2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Paket 3 Macam	Rp 4,950,000,000	Akreditasi Laboratorium Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Paket	Rp 10,376,496,096

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
		Manusia (SDM) Penyediaan Bahan Kimia/Reagensia dan Bahan Penunjang Lainnya Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Untuk Mendukung Operasional Perkantoran Berjalan Optimal 100% Promosi Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	12 Bulan  12 Bulan  7 Jenis		Penyediaan Bahan Kimia/Reagensia dan Bahan Penunjang Lainnya Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Untuk Mendukung Operasional Perkantoran Berjalan Optimal 100% Promosi Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	3 Macam  12 Bulan  12 Bulan  7 Jenis	
<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>	<b>62.84%</b>	<b>Rp 8,889,983,992</b>	<b>Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>		<b>Rp 9,410,498,842</b>
<b>1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>				<b>Rp -</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelanggan</b>	<b>88 Persen</b>	<b>Rp 4,636,576,450</b>
1.02.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan				Rp -	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	84 Unit	Rp 4,636,576,450
<b>1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk</b>		<b>Indeks Kepuasan Pelanggan</b>	<b>88 Persen</b>	<b>Rp 8,889,983,992</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelanggan</b>	<b>88 Persen</b>	<b>Rp 4,773,922,392</b>

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
<b>UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>							
1.02.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Bapelkes		Penyediaan Alat-Alat Laboratorium Penyediaan Bahan Kimia/Reagensia dan Bahan Penunjang Lainnya	32 Macam  2 Jenis	Rp 8,889,983,992	Penyediaan Bahan Kimia/Reagensia dan Bahan Penunjang Lainnya	2 Jenis	Rp 4,773,922,392
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	8,076,426,163.00	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	8,076,426,163.00
1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	24,660,000.00	Terlaksanakannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	24,660,000.00
-		Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	-	-	-	-
1.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terlaksananya Pentausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	1 Tahun	24,660,000.00	Terlaksananya Pentausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	1 Tahun	24,660,000.00
1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah	1 Tahun	10,320,000.00	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	100%	10,320,000.00
1.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah		Terlaksananya Penatausahaan BMD Sesuai Ketentuan yang Berlaku	1 Tahun	10,320,000.00	Terlaksananya Penatausahaan BMD Sesuai Ketentuan yang Berlaku	1 Tahun	10,320,000.00

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
pada SKPD							
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	142,828,500.00	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	142,828,500.00
1.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	24,092,000.00	Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	24,092,000.00
1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	53,500,500.00	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	53,500,500.00
1.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	37,101,000.00	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	37,101,000.00
1.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan logistik Kantor	1 Tahun	1,996,000.00	Tersedianya Bahan logistik Kantor	12 Bulan	1,996,000.00
1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	13,389,000.00	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	13,389,000.00
1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	1 Tahun	12,750,000.00	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan	12,750,000.00
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Terlaksanakannya Pengadaan Peralatan Kantor	1 Tahun	85,565,000.00	Terlaksanakannya Pengadaan Peralatan Kantor	100%	85,565,000.00

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
Pemerintah Daerah							
1.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	85,565,000.00	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pelatihan Daring	1 Paket	85,565,000.00
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksanakannya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	100%	1,179,757,200.00	Terlaksanakannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1,179,757,200.00
1.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1,000,000.00	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1,000,000.00
1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	294,542,000.00	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	294,542,000.00
1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya Jasa Tenaga Keamanan Kantor Terbayarnya Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	884,215,200.00	Terbayarnya Jasa Tenaga Keamanan Kantor Terbayarnya Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	884,215,200.00
1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksanakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	330,627,400.00	Terlaksanakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	330,627,400.00
1.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan		Terbayarnya Pajak Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Operasional Kantor Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	1 Tahun 1 Tahun	86,947,400.00	Terbayarnya Pajak Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Operasional Kantor Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Operasional Kantor	10 Unit 12 Bulan	86,947,400.00

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Operasional Kantor					
1.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel		Tersedianya Pemeliharaan Mebel	1 Tahun	3,100,000.00	Tersedianya Pemeliharaan Mebel	12 Bulan	3,100,000.00
1.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	40,680,000.00	Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12 Bulan	40,680,000.00
1.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Kantor	1 Tahun	169,000,000.00	Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Kantor	12 Bulan	169,000,000.00
1.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Sarana Prasarana dan Bangunan Kantor	1 Tahun	30,900,000.00	Terpeliharanya Sarana Prasarana dan Bangunan Kantor	12 Bulan	30,900,000.00
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	84%	6,302,668,063.00	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	86%	6,302,668,063.00
1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Pelayanan Pelatihan dan Non Pelatihan yang Dilaksanakan dari Jasa Layanan BLUD Pelayanan Pendukung dan Penunjang Pelayanan BLUD	32 Kegiatan 12 Bulan	6,302,668,063.00	Pelayanan Pelatihan dan Non Pelatihan yang Dilaksanakan dari Jasa Layanan BLUD Pelayanan Pendukung dan Penunjang Pelayanan BLUD	32 Kegiatan 12 Bulan	6,302,668,063.00
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Mantan Linatih yang Meningkatkan Kompetensinya	68%	165,288,500.00	Persentase Mantan Linatih yang Meningkatkan Kompetensinya	68%	165,288,500.00

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	86%	165,288,500.00	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	86%	165,288,500.00
1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Audit Mutu Internal Bapelkes Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) Grand Design Laboratorium Kelas yang Dibuat Grand Design Laboratorium Lapangan yang Dibuat Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran yang Mendukung Operasional Bapelkes Kurikulum Pelatihan yang Dibuat Pelayanan Pelatihan dan Non Pelatihan yang Dilaksanakan Pengembangan Sistem Pembelajaran	2 Laporan 6 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 12 Bulan 1 Kurikulum 1 Kegiatan 1 Sistem	165,288,500.00	Audit Mutu Internal Bapelkes Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) Grand Design Laboratorium Kelas yang Dibuat Grand Design Laboratorium Lapangan yang Dibuat Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran yang Mendukung Operasional Bapelkes Kurikulum Pelatihan yang Dibuat Pelayanan Pelatihan dan Non Pelatihan yang Dilaksanakan Pengembangan Sistem Pembelajaran	2 Laporan 6 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 12 Bulan 1 Kurikulum 1 Kegiatan 1 Sistem	165,288,500.00
RSJ GRHASIA							
1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	
1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN, naban	1 Tahun		Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN, naban	1 Tahun	

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan tunjangan ASN / Naban	1 Tahun	38,384,349,618	Gaji dan tunjangan ASN / Naban	1 Tahun	39,544,956,722
1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	62.84%		Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	62.84%	
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa dan napza	1 Tahun		Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa dan napza	1 Tahun	
1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		1. Jumlah kunjungan diklat 2. Jumlah praktikan 3. Penanganan pasien rawat inap 4. Penanganan pasien rawat jalan	1. 4.400 kunjungan 2. 2.400 orang 3. 2.016 pasien 4. 42.938 kunjungan	20,500,000,000	1. Jumlah kunjungan diklat 2. Jumlah praktikan 3. Penanganan pasien rawat inap 4. Penanganan pasien rawat jalan	1. 4.400 kunjungan 2. 2.400 orang 3. 2.016 pasien 4. 42.938 kunjungan	31,367,158,728
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	62.84%		Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	62.84%	
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan		Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa dan napza	1 Tahun		Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa dan napza	1 Tahun	

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
1.02.02.1.02.02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Pembangunan gedung trauma healing dan visum et repertum	1 Paket	4,012,168,000	Pembangunan gedung trauma healing dan visum et repertum	1 Paket	4,012,168,000
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa dan napza	1 Tahun		Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa dan napza	1 Tahun	
1.02.02.1.01.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit		1. Pengadaan hardware SIMRS 2. Pengadaan perlengkapan gedung trauma healing dan visum et repertum 3. Pengadaan perlengkapan ruang isolasi 4. Penyusunan dokumen AMDAL lingkungan	1. 1 Paket 2. 1 Paket 3. 1 Paket 4. 1 Paket	1,785,101,450	1. Pengadaan hardware SIMRS 2. Pengadaan perlengkapan gedung trauma healing dan visum et repertum 3. Pengadaan perlengkapan ruang isolasi 4. Penyusunan dokumen AMDAL lingkungan	1. 1 Paket 2. 1 Paket 3. 1 Paket 4. 1 Paket	1,785,101,450
RS PARU RESPIRA							
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	22,396,294,591	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	44,324,763,702
1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	10,568,262,591	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	20,418,173,501

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	10,510,302,591	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	20,360,213,501
1.02.02.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	1 tahun	57,960,000	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	1 tahun	57,960,000
1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	19,800,000	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	19,800,000
1.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 tahun	19,800,000	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 tahun	19,800,000
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	1,408,232,000	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	730,160,000
1.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel		Tersedianya Mebel Di RSP Respira	9 jenis	159,476,000	Tersedianya Mebel Di RSP Respira	9 jenis	47,446,000
1.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		- Tersedianya alat komunikasi telepon - Tersedianya alat penghancur kertas - Tersedianya peralatan komputer lainnya - Tersedianya peralatan rumah tangga dan alat dapur - Tersedianya komputer PC	- 2 jenis - 2 buah - 8 jenis - 7 jenis - 14 unit	329,114,000	- Tersedianya alat komunikasi telepon - Tersedianya alat penghancur kertas - Tersedianya peralatan komputer lainnya - Tersedianya peralatan rumah tangga dan alat dapur - Tersedianya komputer PC dan laptop - Tersedianya Alat Kantor lainnya - Tersedianya Power supply	- 1 unit - 0 jenis - 0 jenis - 7 jenis - 0 jenis - 2 jenis - 10 unit - 3 Jenis - 3 Jenis	316,064,000

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
		dan Laptop			-Tersedianya Peralatan komputer -Tersedianya Personal Komputer		
1.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		- Tersedianya AC, Kipas dan exhaust fan - Tersedianya kamera CCTV - Tersedianya tambah daya listrik	- 30 unit - 1 paket - 1 paket	919,642,000	- Tersedianya AC, Kipas dan exhaust fan - Tersedianya kamera CCTV - Tersedianya tambah daya listrik	- 30 unit - 1 paket - 1 paket	366,650,000
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	62.84%	10,400,000,000	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	62.84%	23,156,630,201
1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		- Tersedianya Administrasi Perkantoran - Tersedianya Akreditasi RS - Tersedianya Jasa Pelayanan RS - Tersedianya Kegiatan Peningkatan Mutu - Tersedianya Kegiatan Promosi Kesehatan - Tersedianya Listrik, Telpon dan Air - Tersedianya Pelayanan oleh pihak ketiga - Tersedianya Pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan - Tersedianya pemeliharaan rumah tangga rumah sakit - Tersedianya Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan - Tersedianya Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan	- 7 Jenis - 1 dokumen - 6 kali - 11 Kegiatan - 3 Kegiatan - 1 tahun - 5 Jenis - 12 Bulan - 12 Bulan - 4 jenis - 5 Kegiatan - 6 Jenis - 20 Orang	10,400,000,000	- Tersedianya Administrasi Perkantoran - Tersedianya Akreditasi RS - Tersedianya Jasa Pelayanan RS - Tersedianya Kegiatan Peningkatan Mutu - Tersedianya Kegiatan Promosi Kesehatan - Tersedianya Listrik, Telpon dan Air - Tersedianya Pelayanan oleh pihak ketiga - Tersedianya Pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan - Tersedianya pemeliharaan rumah tangga rumah sakit - Tersedianya Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan - Tersedianya Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan - Tersedianya Saran Penunjang Pelayanan - Tersedianya Tenaga Non PNS	- 7 Jenis - 1 dokumen - 6 kali - 11 Kegiatan - 3 Kegiatan - 1 tahun - 5 Jenis - 12 Bulan - 12 Bulan - 4 jenis - 5 Kegiatan - 6 Jenis - 22 Orang - 1 unit - 4 Unit	23,156,630,201

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
		- Tersedianya Saran Penunjang Pelayanan - Tersedianya Tenaga Non PNS			- Tersedianya UPS Server - Tersedianya Printer Thermal - Tersedianya buku obat - Tersedianya keranjang obat - Terlaksananya Review DED	- 15 buah - 25 buah - 1 paket	
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	62.84%	10,413,708,000	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	62.84%	9,761,512,940
1.02.02.1.01 Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi		Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	62.84%	8,848,130,000	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	62.84%	8,195,934,940
1.02.02.1.01.03 Pengembangan Rumah Sakit		- Terbentuknya tim persiapan pengadaan tanah - Terselenggaranya konsultasi publik/konsultasi ulang - Terbentuknya tim kajian keberatan atas lokasi rencana pembangunan - Tersedianya dokumen penetapan lokasi - Terselenggaranya tahapan pelaksanaan pengadaan tanah	- 1 tim - 1 paket - 1 tim - 1 dokumen - 4 Tahap	2,659,700,000	- Terbentuknya tim persiapan pengadaan tanah - Terselenggaranya konsultasi publik/konsultasi ulang - Terbentuknya tim kajian keberatan atas lokasi rencana pembangunan - Tersedianya dokumen penetapan lokasi - Terselenggaranya tahapan pelaksanaan pengadaan tanah	- 1 tim - 1 paket - 0 tim - 1 dokumen - 1 Tahap	1,251,400,000

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Tersedianya Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	17 Jenis	636,100,000	Tersedianya Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	108 unit	1,392,204,940
1.02.02.1.01.22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Tersedianya Obat-obatan untuk pasien	2 paket	5,552,330,000	Tersedianya Obat-obatan untuk pasien	2 paket	5,552,330,000
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	62.84%	1,565,578,000	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	62.84%	1,565,578,000
1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit		- Tersedianya Alat Bengkel - Tersedianya BMHP dan Reagen	- 3 jenis - 2 paket	1,565,578,000	- Tersedianya Alat Bengkel - Tersedianya BMHP dan Reagen	- 3 jenis - 2 paket	1,565,578,000

Pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, khususnya pada bagian lampiran, memuat Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, maka sebagian besar program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi adalah memfasilitasi penyelenggaraan kesehatan Kabupaten/ Kota, disamping program dan kegiatan yang langsung ditujukan ke masyarakat. Dinas Kesehatan juga mengampu usulan program dari pemangku kepentingan yaitu Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dan Palang Merah Indonesia (PMI) DIY, yang ditujukan untuk mendukung kesekretariatan (operasional). Sejak diberlakukannya Pergub DIY No 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial, Dinkes DIY juga mengakomodir dana hibah dan memfasilitasi bantuan keuangan khusus (BKK) dari usulan kabupaten/ kota diantaranya adalah BKK untuk penyediaan sarana jamban sehat (Jambanisasi) dan dukungan pemenuhan standar alat kesehatan RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo.

**Tabel 2-15 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Tahun Alokasi	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran (Rp)
2010	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular	DIY	KPAD	172.570.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	108.000.000
2011	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular	DIY	KPAD	89.990.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	179.669.000
2012	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular	DIY	KPAD	270.815.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	389.342.200
2013	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular	DIY	KPAD	286.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	243.662.800
2014	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular	DIY	KPAD	292.398.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	239.801.000

Tahun Alokasi	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran (Rp)
2015	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular	DIY	KPAD	400.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	400.000.000
2016	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular	DIY	KPAD	463.229.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	620.000.000
2017	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular	DIY	KPAD	564.818.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	443.156.000
2018	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	DIY	KPAD	500.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	420.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan	Peingkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Lain	DIY	BKK RSUD Wates	70.000.000.000
	Program Kesehatan Masyarakat	Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	DIY	BKK Jambanisasi	1.036.000.000
2019	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	DIY	KPAD	500.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Lain	DIY	PMI	500.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Lain	DIY	BKK Pemandangan RSUD Wates	70.000.000.000
	Program Kesehatan Masyarakat	Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	DIY	BKK Jambanisasi	2.000.000.000

Tahun Alokasi	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran (Rp)
2020	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	DIY	KPAD	500.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Lain	DIY	PMI	500.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan lain	DIY	BKK Pembang una n RSUD Wates	40.810.000.000
	Program Kesehatan Masyarakat	Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	DIY	BKK Jambanisasi	3.378.000.000
2021	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Keg:</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi <b>Sub keg:</b> Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DIY	KPAD	500.000.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Keg:</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi <b>Sub keg:</b> Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	DIY	PMI	500.000.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Keg:</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi <b>Sub keg:</b> Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan	DIY	BKK Jambanisasi	1.525.000.000
2022	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Keg:</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi <b>Sub keg:</b> Pengelolaan	DIY	KPAD	500.000.000

Tahun Alokasi	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran (Rp)
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Keg:</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi <b>Sub keg:</b> Pemenuhan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	DIY	PMI	500.000.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Keg:</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi <b>Sub keg:</b> Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan	DIY	BKK Jambanisasi	1.525.000.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Keg:</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi <b>Sub keg:</b> Pemenuhan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	DIY	BKK Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Saptosari	27.427.517.771

## BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 disusun sebagai penjabaran operasional dari strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2020-2024 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan Pengembangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh program RPJMN 2020-2024 terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6. Pengentasan kemiskinan; dan
7. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Filosofi yang mendasari pembangunan daerah DIY adalah *Hamemayu Hayuning Bawana*, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya. Bertitik tolak dari dasar filosofi, kondisi dan aspek-aspek potensial, serta perkembangan global dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung, maka ditetapkan visi pembangunan DIY yang akan dicapai dalam 2005 sampai dengan 2025 adalah : **“Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**. Salah satu definisi masyarakat yang maju adalah masyarakat yang derajat kesehatannya tinggi, laju pertumbuhan penduduk kecil, angka harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial baik. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal.
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Tema pembangunan tahun 2023 yaitu "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan". Tema tersebut dipilih dengan dasar pemikiran bahwa dalam rangka perwujudan visi jangka panjang DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera, maka DIY harus memiliki daya saing di berbagai sektor

untuk bisa mencapai cita-cita tersebut. Berdasarkan pada tema tersebut maka prioritas pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM (pendidikan , kesehatan dan budaya)
2. pemulihan ekonomi
3. Penurunan Kemiskinan
4. Pengurangan gap ketimpangan wilayah
5. Peningkatan kualitas layanan publik
6. Menjaga daya dukung lingkungan.

Identifikasi permasalahan terkait kesehatan sesuai RKPD yaitu:

1. Belum meratanya jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada terutama RS dan ketersediaan dokter spesialis
2. Kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak masih perlu ditingkatkan dan perlunya pendampingan keluarga sehat
3. Tantangan ke depan kebosanan melaksanakan protokol kesehatan semakin menurun
4. Mengupayakan RSUD/ Puskesmas mempunyai elektronik rekam medis
5. Kondisi RSUD dan puskesmas yang belum ramah terhadap lansia, anak- anak, serta difabel/ penyandang disabilitas.

Rekomendasi kebijakan yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Mengusulkan indikator terbaru disesuaikan dengan pusat, baik indikator pembangunan, sarana dan prasarana dan tenaga medis
2. Pelayanan melalui protokol kesehatan tetap dijaga, juga dipertimbangkan tenaga medis yang tersedia dengan mempertimbangkan berbagai hal
3. Perlu diperhatikan tumbuh kembang, pendidikan anak di masa pandemi dan imunisasi anak serta pemberian tambahan makanan
4. Meningkatkan pola hidup sehat dan sadar kebutuhan gizi (kalori) untuk menunjang standar pola hidup sehat dan kecukupan kalori yang erat kaitannya dengan standar hidup sehat menurut WHO
5. Perlu dukungan yang nyata dan serius untuk menemukan dan mengobati penyakit menular terutama TB untuk mencapai tujuan zero TB di tahun 2030.
6. Pemberian gaji yang layak bagi pegawai di Rumah Sakit baik negeri maupun swasta.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
(1)		(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Penurunan Jumlah kasus kematian ibu	37	36	35	34	34

1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penurunan Jumlah kasus kematian bayi	340	336	327	323	318
		Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	15.8	15.7	15.6	15.7	15.4

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya perilaku sadar sehat	Presentase puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga	%	67,77 (82)	100 (121)	100 (121)	100 (121)	100 (121)	100 (121)
2.	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi	%	64.89 170	67.18 176	69.08 181	70.99 186	73.28 192	70,99 192
3	Terwujudnya pelayanan kesehatan Jiwa yang bermutu	Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa	%	56	60	65	70	75	70
4	Terwujudnya pelayanan kesehatan Paru yang bermutu	Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan*	%	73.20	74.8	77.2	78.9	81.3	78,9

Catatan :\* Kesehatan Paru

### 3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan, sesuai dengan arah pembangunan kesehatan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan hal hal / isu strategis maka akan ditempuh melalui berbagai program/kegiatan yang terinci dalam usulan Dinas Kesehatan DIY tahun 2023. Secara rinci, rencana kerja yang dituangkan dalam usulan tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana 2022 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				150.052.916.645				198.143.712.015
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.125.000				49.637.500
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	35.125.000			4	38.637.500
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2.500.000			2	2.750.000
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	15	7.500.000			15	8.250.000
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				90.587.509.929				91.725.491.200
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinkes)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bln	260	31.905.947.629			260	32.353.591.762
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Respira)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bln	171	20.052.412.682			171	20.280.030.663
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Grhasia)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bln	321	38.384.349.618			337	38.846.097.875
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinkes)	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	12	70.200.000			12	77.200.000
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BLKK)	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	4	36.360.000			4	36.360.000
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Bapel Jamkesos)	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	4	31.860.000			4	31.860.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana 2022 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Bapelkes)	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	4	24.600.000			4	24.600.000
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Respira)	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	4	75.780.000			4	69.420.000
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinkes)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.662.000			1	1.776.000
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD (Dinkes)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	25	4.338.000			25	4.554.900
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				74.180.000				74.180.000
1	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.000.000			1	2.000.000
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	14.400.000			1	14.400.000
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (BLKK)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	18.600.000			1	18.600.000
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Bapelkes)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	9.060.000			1	9.060.000
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Bapelkes)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	10.320.000			1	10.320.000
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Respira)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	19.800.000			1	19.800.000
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9.500.000				9.500.000
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	9.500.000			30	9.500.000
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.135.069.000				2.114.741.300
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	4.500.000			1	5.000.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana 2022 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bapel Jamkesos)	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.967.000			1	7.663.700
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bapelkes)	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	29.989.500			1	32.988.450
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	24.150.000			1	26.100.000
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bapel Jamkesos)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	142.370.000			1	142.000.000
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bapelkes)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	52.696.500			1	57.966.150
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	15.000.000			1	15.000.000
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Bapel Jamkesos)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	24.350.000			2	26.785.000
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (BLKK)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	951.720.000			2	1.046.892.000
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Bapelkes)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	49.984.000			1	54.982.400
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000			1	15.000.000
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BLKK)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	170.820.000			1	187.902.000
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bapel Jamkesos)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	90.000.000			2	94.500.000
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bapelkes)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	16.256.000			1	17.881.600
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	13.000.000			1	13.000.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana 2022 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Bapel Jamkesos)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	45.000.000			1	48.500.000
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Bapelkes)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	15.500.000			1	17.050.000
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	4.600.000			12	5.000.000
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Bapel Jamkesos)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	3.600.000			2	4.680.000
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	105.000.000			1	105.000.000
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bapel Jamkesos)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	151.766.000			2	157.850.000
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bapelkes)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	30.000.000			2	33.000.000
1	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	107.800.000			0	-
1	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Jamkesos)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	65.000.000			0	-
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.379.445.400				56.791.580.000
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	500.000.000			0	-
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (Dinkes)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	-			0	-
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (Respira)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	113.219.000			1	45.000.000
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (BLKK)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	741.300.000			1	555.975.000
1	02	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (BLKK)	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	1	7.100.000			0	-
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinkes)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	22	328.750.000			30	322.000.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana 2022 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BLKK)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	21	279.000.000			5	279.000.000
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bapelkes)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	230.210.000			1	253.231.000
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Respira)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	29	616.742.400			15	250.000.000
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bapel Jamkesos)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	40.000.000			0	-
1	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinkes)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	250.000.000			1	55.000.000.000
1	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BLKK)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	190.000.000			0	-
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	5.624.000			2	5.624.000
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BLKK)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	25	32.500.000			2	35.750.000
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Respira)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	45.000.000			4	45.000.000
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.868.824.716				5.425.167.915
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinkes)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.500.000			1	1.500.000
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bapelkes)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.500.000			1	1.650.000
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinkes)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	616.820.000			1	700.000.000
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BLKK)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	599.163.000			3	718.995.600

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana 2022 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bapel Jamkesos)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	104.750.000			3	109.980.000
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bapelkes)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	328.394.000			1	361.233.400
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinkes)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	950.000.000			1	950.000.000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BLKK)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	884.414.276			4	1.061.297.131
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bapel Jamkesos)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	409.641.720			4	450.605.892
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bapelkes)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	972.641.720			1	1.069.905.892
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.349.061.000				1.288.577.100
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinkes)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	233.150.000			50	233.150.000
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Bapel Jamkesos)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	58.500.000			6	61.425.000
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Bapelkes)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	90.104.000			10	99.114.400
1	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel (Bapelkes)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	15.000.000			1	16.500.000
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinkes)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	150.000.000			1	150.000.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana 2022 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bapelkes)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	56.507.000			1	62.157.700
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinkes)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	180.000.000			1	180.000.000
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Bapel Jamkesos)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	100.000.000			4	72.000.000
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Bapelkes)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	300.000.000			1	330.000.000
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BLKK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	90.000.000			0	-
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Bapel Jamkesos)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	6.500.000			4	8.000.000
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Bapelkes)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	69.300.000			4	76.230.000
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				47.604.201.600				40.664.837.000
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (BLKK)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	5.994.201.600			1	5.772.100.000
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Bapelkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	3.650.000.000			1	3.630.000.000
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Grhasia)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	20.360.000.000			1	20.599.900.000
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Respira)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	17.600.000.000			1	10.662.837.000

1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				306.397.556.310				172.813.454.450
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				204.999.073.610				82.642.288.750
1	02	02	1.10	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	2	6.336.275.110			4	52.692.677.250
1	02	02	1.10	03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	175.000.000.000			1	10.450.000.000
1	02	02	1.10	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	41	4.783.500.000			15	256.000.000
1	02	02	1.10	12	Pengadaan Prasarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	1.104.930.000			-	-
1	02	02	1.10	15	Pengadaan dan pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	16	4.902.764.000			15	3.049.700.000
1	02	02	1.10	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	6	406.604.500			4	234.911.500
1	02	02	1.10	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinkes)	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	1	2.500.000.000			1	2.600.000.000
1	02	02	1.10	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	2	5.965.000.000			2	6.859.000.000
1	02	02	1.10	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	2	4.000.000.000			2	6.500.000.000

1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				97.554.695.200				90.124.208.700
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (DRK)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	130	788.605.000			145	793.305.000
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Farmakmin)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	130	250.000.000			145	265.000.000
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (BLKK)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	130	22.000.000.000			145	16.940.000.000
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	407	300.635.500			407	330.699.050
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	6	484.050.000			6	523.100.000
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	5	228.630.000			5	300.000.000
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Usia Lanjut	Dokumen	3	24.824.000			3	30.000.000
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	8	3.625.060.000			8	3.650.000.000
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	2	106.850.000			2	138.905.000
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	4	117.290.000			4	152.477.000
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	3	1.204.720.000			3	1.325.192.000
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	10	1.549.710.000			11	1.704.681.000
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	2	56.726.000			2	56.726.000

1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Bapel Jamkesos)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	6	59.825.929.000			6	57.553.250.500
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	229.614.000			1	252.575.400
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (DRK)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	4	487.280.000			4	557.280.000
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Farmakmin)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	5.266.000			1	10.216.000
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	6	528.060.000			6	561.060.000
1	02	02	1.02	24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga		8.640.000				8.640.000
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Grhasia)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	12	4.280.305.700			5	3.327.244.850
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Respira)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	2	1.452.500.000			2	1.643.856.900
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				5.700.000				6.300.000
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	3	5.700.000				6.300.000
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				63.530.000				67.383.000
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	38	38.530.000				42.383.000
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	30	25.000.000				25.000.000

1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				2.732.621.560				970.873.030
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				30.000.000				30.000.000
1	02	03	1.02	02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Orang	5	30.000.000				30.000.000
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				2.702.621.560				940.873.030
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	200.000.000				250.000.000
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinkes)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	30	20.000.000				20.000.000
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Bapelkes)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	600	2.482.621.560				670.873.030
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				29.224.000				32.906.000
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cadang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)				18.577.000				21.859.000
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	Sarana	34	18.577.000			37	21.859.000
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) (Farmakmin)				10.647.000				11.047.000
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	35	10.647.000			36	11.047.000

2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				612.220.000				673.442.000
2	22	08	1.08		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				612.220.000				673.442.000
2	22	08	1.08	04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	Unit	12	612.220.000			12	673.442.000

## BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan 2023

Nama SKPD: Dinas Kesehatan

Pagu : Rp.

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana 2022 (Tahun Rencana)								
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			150.052.916.645				
1	02	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		45.125.000				
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	35.125.000	
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2.500.000	
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	15	7.500.000	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				90.587.509.929	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinkes)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bln	260	31.905.947.629	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Respira)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bln	171	20.052.412.682	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Grhasia)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bln	321	38.384.349.618	
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinkes)	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	12	70.200.000	
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BLKK)	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	4	36.360.000	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana 2022 (Tahun Rencana)				
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Bapel Jamkesos)	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	4	31.860.000	
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Bapelkes)	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	4	24.600.000	
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Respira)	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	4	75.780.000	
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinkes)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.662.000	
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD (Dinkes)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	25	4.338.000	
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				74.180.000	
1	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.000.000	
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	14.400.000	
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (BLKK)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	18.600.000	
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Bapel Jamkesos)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	9.060.000	
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Bapelkes)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	10.320.000	
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Respira)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	19.800.000	
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9.500.000	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana 2022 (Tahun Rencana)				
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	9.500.000	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.135.069.000	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	4.500.000	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bapel Jamkesos)	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.967.000	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bapelkes)	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	29.989.500	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	24.150.000	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bapel Jamkesos)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	142.370.000	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bapelkes)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	52.696.500	
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Bapel Jamkesos)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	24.350.000	
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (BLKK)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	951.720.000	
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Bapelkes)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	49.984.000	
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana 2022 (Tahun Rencana)				
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BLKK)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	170.820.000	
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bapel Jamkesos)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	90.000.000	
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bapelkes)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	16.256.000	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	13.000.000	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Bapel Jamkesos)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Bapelkes)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	15.500.000	
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	4.600.000	
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Bapel Jamkesos)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	3.600.000	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	105.000.000	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bapel Jamkesos)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	151.766.000	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bapelkes)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	30.000.000	
1	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	107.800.000	
1	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Jamkesos)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	65.000.000	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana 2022 (Tahun Rencana)				
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.379.445.400	
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	500.000.000	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (Dinkes)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	-	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (Respira)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	113.219.000	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (BLKK)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	741.300.000	
1	02	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (BLKK)	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	1	7.100.000	
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinkes)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	22	328.750.000	
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BLKK)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	21	279.000.000	
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bapelkes)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	230.210.000	
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Respira)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	29	616.742.400	
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bapel Jamkesos)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	40.000.000	
1	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinkes)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	250.000.000	
1	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BLKK)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	190.000.000	
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	5.624.000	
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BLKK)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	25	32.500.000	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana 2022 (Tahun Rencana)				
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Respira)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	45.000.000	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.868.824.716	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinkes)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.500.000	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bapelkes)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.500.000	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinkes)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	616.820.000	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BLKK)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	599.163.000	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bapel Jamkesos)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	104.750.000	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bapelkes)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	328.394.000	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinkes)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	950.000.000	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BLKK)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	884.414.276	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bapel Jamkesos)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	409.641.720	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bapelkes)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	972.641.720	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.349.061.000	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana 2022 (Tahun Rencana)				
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinkes)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	233.150.000	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Bapel Jamkesos)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	58.500.000	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Bapelkes)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	90.104.000	
1	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel (Bapelkes)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	15.000.000	
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinkes)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	150.000.000	
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bapelkes)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	56.507.000	
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinkes)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	180.000.000	
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Bapel Jamkesos)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	100.000.000	
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Bapelkes)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	300.000.000	
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BLKK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	90.000.000	
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Bapel Jamkesos)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	6.500.000	
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Bapelkes)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	69.300.000	

1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				47.604.201.600	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (BLKK)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	5.994.201.600	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Bapelkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	3.650.000.000	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Grhasia)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	20.360.000.000	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Respira)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	17.600.000.000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				306.397.556.310	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				204.999.073.610	
1	02	02	1.10	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	2	6.336.275.110	
1	02	02	1.10	03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	175.000.000.000	
1	02	02	1.10	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	41	4.783.500.000	
1	02	02	1.10	12	Pengadaan Prasarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	1.104.930.000	
1	02	02	1.10	15	Pengadaan dan pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	16	4.902.764.000	

1	02	02	1.10	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	6	406.604.500	
1	02	02	1.10	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinkes)	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	1	2.500.000.000	
1	02	02	1.10	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	2	5.965.000.000	
1	02	02	1.10	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	2	4.000.000.000	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				97.554.695.200	
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (DRK)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	130	788.605.000	
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Farmakmin)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	130	250.000.000	
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (BLKK)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	130	22.000.000.000	
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	407	300.635.500	
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	6	484.050.000	

1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	5	228.630.000	
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Usia Lanjut	Dokumen	3	24.824.000	
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	8	3.625.060.000	
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	2	106.850.000	
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	4	117.290.000	
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	3	1.204.720.000	
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular)	Dokumen	10	1.549.710.000	
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	2	56.726.000	
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Bapel Jamkesos)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	6	59.825.929.000	
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	229.614.000	
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (DRK)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	4	487.280.000	
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Farmakmin)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	5.266.000	
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	6	528.060.000	

1	02	02	1.02	24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga		8.640.000	
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Grhasia)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	12	4.280.305.700	
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Respira)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	2	1.452.500.000	
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				5.700.000	
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	3	5.700.000	
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				63.530.000	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	38	38.530.000	
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	30	25.000.000	
1	02	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>				<b>2.732.621.560</b>	
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				30.000.000	
1	02	03	1.02	02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Orang	5	30.000.000	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				2.702.621.560	
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	200.000.000	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinkes)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	30	20.000.000	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Bapelkes)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	600	2.482.621.560	

1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				29.224.000	
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cadang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)				18.577.000	
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Sarana	34	18.577.000	
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) (Farmakmin)				10.647.000	
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	35	10.647.000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				612.220.000	
2	22	08	1.08		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				612.220.000	
2	22	08	1.08	04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	Unit	12	612.220.000	

## BAB 5 PENUTUP

Dokumen Renja Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2023 pada SKPD Dinas Kesehatan DIY. Dokumen Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai penyempurnaan dari dokumen Rencana Kerja 2023 dan merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY 2023.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan DIY Tahun 2023 diharapkan menjadi acuan penyelarasan dalam penetapan anggaran baik melalui sumber dana APBD DIY maupun dana dekonstrasi serta sumber dana lainnya. Selain itu, dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan program/kegiatan yang berkelanjutan.

Demikian, Rencana Kerja Dinas Kesehatan DIY Tahun 2023 disusun melalui berbagai mekanisme proses perencanaan program dan anggaran dengan harapan menjadi dukungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Yogyakarta,

2022

KEPALA,  
  
DISKES  
drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes  
NIP. 1965091 6





DINAS KESEHATAN DIY

Jl.Gondosuli No.6 Umbulharjo, Yogyakarta

Telepon 0274 - 563153

e-mail : [dinkes@jogjaprovo.go.id](mailto:dinkes@jogjaprovo.go.id)